

**PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN BELANJA
PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
TAHUN 2008-2017**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas Dan Memenuhi Syarat – syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Agus Mulato

NPM : 1451010004

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN BELANJA
PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO DI PROVINSI LAMPUNG DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2008-2017**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas Dan Memenuhi Syarat – syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

Agus Mulato

NPM : 1451010004

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Evi Ekawati, S.E., M.Si

Pembimbing II : M. Kurniawan M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Provinsi Lampung terletak paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia dimana Ibu kotanya terletak di Bandar Lampung. Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang potensial. Dengan potensi tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Lampung sehingga kegiatan investasi tersebut yang dilakukan baik swasta maupun pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tergambarkan dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berupa data *time series* dengan rentan waktu 10 tahun mulai dari 2008 hingga 2017, data diolah dengan menggunakan software SPSS 17. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu PDRB (Y) dan variabel independen yaitu tingkat investasi (X_1), Tenaga Kerja (X_2) dan Belanja Pemerintah (X_3). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis *regresi linear berganda*.

Berdasarkan analisis *regresi linear berganda*, Diuji keberartiannya dengan menggunakan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, hasil uji T pada tingkat investasi Investasi berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, diatas untuk variabel Tenaga Kerja terhadap PDRB, menunjukkan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, untuk variabel Belanja Pemerintah terhadap PDRB, menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000 Sedangkan pengujian menggunakan uji F untuk melihat pengaruh secara bersama-sama dari variabel bebas terhadap variabel terikat, hasil uji F diperoleh Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ itu artinya nilai signifikansi uji F jauh lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan investasi, tenaga kerja dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Tingkat investasi di Provinsi Lampung yang berfluktuasi dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah dalam mengelola potensi yang ada dan sumber daya yang tersedia secara optimal, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk kegiatan yang produktif dengan memperluas kegiatan investasi. Sedangkan dalam perspektif Ekonomi Islam, investasi, tenaga kerja dan belanja pemerintah harus dioptimalkan untuk kepentingan masalah masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2017

Nama : Agus Mulato

NPM : 1451010004

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

DISETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Evi Ekawati, S.E., M.Si

M. Kurniawan M.E.Sy

NIP. 19760202 200912 2 001

NIP. 19860517 201503 1 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

Madnasir, S.E., M.Si

NIP. 19750424 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2008-2017”, disusun oleh Nama : **Agus Mulato NPM.1451010004**, Program Studi Ekonomi Syari’ah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Jum’at, 29 Maret 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Dr. Asriani, S.H., M.H

Sekretaris : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak

Penguji I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.E., M.Si

Penguji II : Evi Ekawati, S.E., M.Si

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin, M.A

NIP. 19580824 198903 003

MOTTO

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١١﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١٢﴾
وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ غَنِيٍّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٣﴾

Artinya : Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. (QS.Nuh 11-12)¹



¹ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2010.
H.570

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kelancaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Sebuah karya kecil yang kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,

1. Bapak Harto Mulyono dan Ibu Suyami
2. Untuk Kakakku Madianto yang selalu senantiasa menjadi pelindung dan penyemangatku
3. Teman Seperjuangan Ekonomi Syari'ah Kelas D angkatan 2014
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tercinta
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Agus Mulato, dilahirkan pada tanggal 15 Agustus 1995. Penulis merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Bapak Harto Mulyono dan Ibu Sulyem. Pria yang akrab dipanggil Agus ini berasal dari Tulang Bawang, ia menempuh pendidikan di:

1. SDN 4 Sidomukti lulus pada tahun 2008,
2. SMP N 2 Penawartama lulus pada tahun 2012,
3. SMA N 1 Penawartama lulus pada tahun 2014,
4. Kemudian ia pada tahun yang sama melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah kemudian pada tahun 2015 berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hingga sekarang di UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, rabb semesta alam. Dialah dzat yang menggenggam setia nyawa setiap makhluk-Nya. Tanpa-Nya semesta alam beserta isinya ini akan binasa. Karena Dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsi dan fungsinya.

Shalawat salam selalu tercurah limpahkan kepada pemimpin umat, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau sukses mengubah masyarakat jahiliyah menjadi sosok yang cerdas secara spiritual, dari masyarakat yang berperangai kasar menjadi masyarakat yang santun, dan dari masyarakat yang tidak dikenal oleh peradaban menjadi umat yang memimpin peradaban. Semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Kiyamah kelak, Amin.

Alhamdulillah, masa kuliah Strata satu dengan jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah dilalui dengan baik dan kini telah tiba pada tahap penyelesaian tugas akhir guna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat Ridho dan Karunia-Nya.
2. Kedua orang tua Bpk Harto Mulyono dan Ibu Suliyem, serta Madianto kakak tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasi selama penulis menempuh studi di bangku kuliah.
3. Bapak Dr.Moh.Bahrudin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
4. Bapak Madnasir, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ekonomi Islam dengan baik dan lancar.
5. Ibu Evi Ekawati, S.E., M.Si dan Bpk M. Kurniawan M.E.Sy selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuanya kepada kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat
7. Keluarga tercinta kelas Ekonomi Islam / D angkatan 2014, spesial buat cowok-cowok kelas D, Agus Mulato, Arif Nur Hidayat, Alfin Muqsit, Dian Kurniawan, Eka Budianta, Irfantri Mahaputra, M.Aji Ridwan Mas, Megi Mirsa, Yayan Amroni, Intan Suri dan Lainnya.

Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, dan apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf baik perkataan maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak dan kepada Allah SWT kami mohon ampunan.

Demikian pengantar dari kami, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan bersama. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

Agus Mulato

NPM 1451010004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pertumbuhan Ekonomi.....	18
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	21
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi	28
4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam	39
5. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam	41

B. Produk Domestik Regional Bruto	44
C. Investasi.....	48
1. Pengertian Investasi	48
2. Teori Investasi.....	51
3. Jenis-Jenis Investasi	53
4. Manfaat dan Tujuan Investasi	55
5. Penanaman Modal Asing	57
6. Penanaman Modal Dalam Negeri	59
7. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam	60
D. Tenaga Kerja	64
E. Belanja Pemerintah	67
1. Pengertian Belanja Pemerintah	67
2. Klasifikasi Belanja Pemerintah	68
3. Belanja Pemerintah dalam Islam.....	69
4. Kebijakan Anggaran Belanja dalam Ekonomi Islam	70
5. Kaidah Belanja Negara dalam Ekonomi Islam	75
F. Hubungan Antar Variabel	77
1. Hubungan Investasi terhadap PDRB.....	77
2. Hubungan Tenaga Kerja Terhadap PDRB.....	80
3. Hubungan Belanja Pemerintah terhadap PDRB	81
G. Penelitian Terdahulu	83
H. Kerangka Pemikiran.....	85
I. Hipotesis.....	87

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	94
B. Sumber Data.....	95
C. Teknik Pengumpulan Data.....	95
D. Populasi dan Sample	96
E. Variabel Penelitian	98
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	99

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian	107
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	107
2. Sejarah Provinsi Lampung	106
3. Geografi Provinsi Lampung	107
4. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung	108
B. Analisa Data	109
1. Analisis Deskriptif	109
2. Uji Asumsi Klasik	114
3. Analisis Regresi Linear Berganda	118
4. Koefisien Determinasi	119
C. Pembahasan Hasil Penelitian	123
1. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung	124
2. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam	137

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	148
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Lampung Tahun 2012-2016.....	8
Tabel 4.1 PDRB per kapita Provinsi Lampung tahun 2008-2017	110
Tabel 4.2 Jumlah Investasi di Provinsi Lampung tahun 2008-2017	111
Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Lampung 2007-2018	112
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung	113
Tabel 4.5 Uji Normalitas	114
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	115
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi	116
Tabel 4.8 Ringkasan Uji Regresi Berganda	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata di Provinsi
	Lampung 10
Gambar 4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas 117



DAFTAR LAMPIRAN

1. PDRB per kapita Provinsi Lampung Periode 2008-2017
2. Jumlah Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2008-2017
3. Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2008-2017
4. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008-2017\
5. Data Input SPSS
6. Hasil Uji Normalitas
7. Hasil Uji Multikolinearitas
8. Hasil Uji Autokorelasi
9. Hasil Uji Heteroskedastisitas
10. Hasil Uji T
11. Hasil Uji F
12. Hasil Analisis Regresi Berganda
13. Table T
14. Tabel F
15. Kartu Konsultasi bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul : Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2017. Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

Investasi merupakan pengeluaran atau penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta : Gramedia, 2011), h.1045

²Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 121

Belanja Pemerintah adalah jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial.³

Tenaga Kerja adalah merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Dan menurut UU No.13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (biasanya satu tahun).⁴

Ekonomi Islam adalah suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).⁵

Secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul peneliti “ Pengaruh Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Produk domestik Regional Bruto di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian ini bermaksud untuk melihat sejauh mana Investasi, Belanja

³Katalog BPS, *Produk Domestik Regional Bruto menurut Penggunaan*, BPS, Lampung, 2013, hlm. 10.

⁴Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

⁵M.Nur Rianto Al arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 6.

Pemerintah dan Tenaga Kerja dapat mempengaruhi PDRB di Lampung dan menganalisis faktor yang mempengaruhi PDRB diatas.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang potensial, ada beberapa sektor unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung diantaranya sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pariwisata dan sektor perdagangan. Dapat dikatakan bahwa sektor-sektor inilah yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, selain itu dengan adanya sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Lampung menjadikan salah satu lahan investasi bagi para investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Maka dengan adanya lahan investasi dapat menjadi peran yang strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari nilai *produk domestik regional bruto* (PDRB).

Semakin banyak investasi yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta diharapkan dapat berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang masuk dalam pasar kerja. Melihat hal tersebut maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang tercermin pada nilai PDRB yang semakin meningkat. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan merupakan cita-cita setiap daerah termasuk Provinsi Lampung. Salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan investasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

2. Alasan Subjektif

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta di dukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan. Disamping itu, penelitian yang penulis lakukan ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.⁶

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi bila dalam perekonomian terdapat beberapa faktor diantaranya, adanya investasi atau penanaman modal, ada Sumber Daya Manusia, ada Sumber Daya Alam, teknologi, efesiensi dan pertumbuhan penduduk.

Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan

⁶Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 423.

tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, sifat yang *pertama* adalah suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus. *Kedua*, suatu usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita. *Ketiga*, adalah kenaikan perkapita itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa.⁷

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang besar juga tidak lepas dari permasalahan ekonomi pada umumnya. Oleh karena itu yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah dibutuhkannya investasi. Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan dan

⁷Malayu Hasibuan, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*, Armico, Bandung, 1987, hlm. 12.

penawaran. Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif. Sedangkan dari sisi penawaran, peningkatan investasi akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi.

Pemerintah atau Negara memiliki peran yang penting dalam perekonomian, pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Dalam ekonomi islam pemerintah adalah agen dari Tuhan.⁸ Artinya bahwa pemerintah memiliki kebijakan dalam perekonomian, pemerintah dalam islam memiliki beberapa prinsip dalam kebijakan ekonomi publik, *pertama* prinsip hakikat kepemilikan, *kedua* prinsip sumber pengambilan kebijakan atau keputusan, prinsip musyawarah dan prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁹ Prinsip ini penting untuk diterapkan dalam mewujudkan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Tentu saja tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pemerintah yang aktif tentu akan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.

⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2008, hlm. 446.

⁹<http://kseirsundip.wordpress.com/2012/07/24/peran-pemerintah-dalam-ekonomi-islam/> diakses pada 30 juni 2016

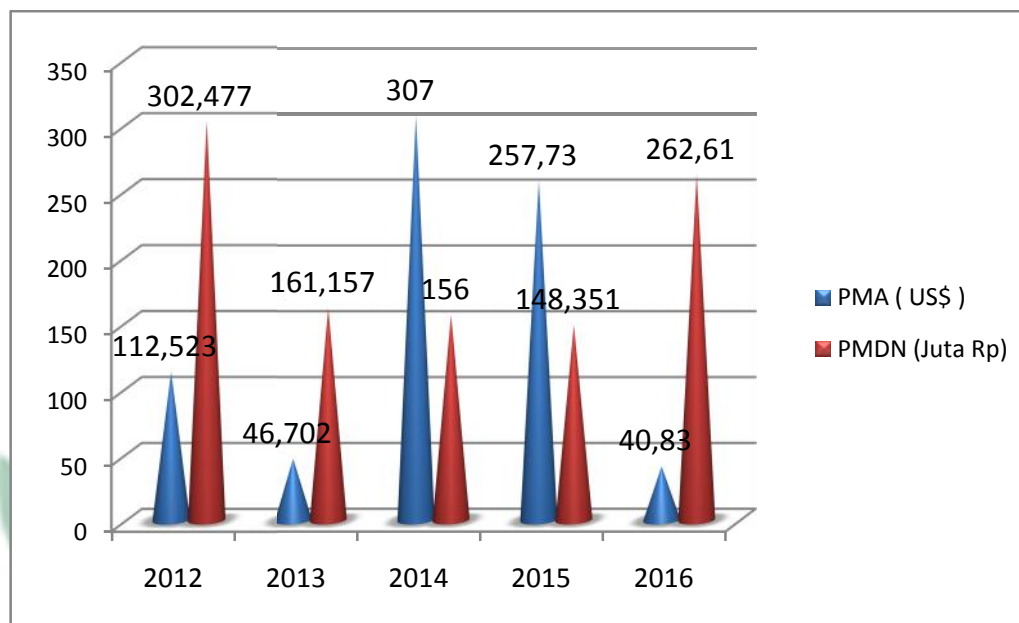
Ekonomi islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang terusmenerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan tersebut dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, sumber sumber pembiayaan bisa berasal dari ekspor, bantuan luar negeri, investasi asing dan tabungan domestik.¹⁰ Adapun alokasi modal yang kita kenal sebagai investasi, utamanya berasal dari dua sumber yakni penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi tidak hanya menaikkan permintaan agregat, tetapi juga menaikkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi meningkatkan stok kapital dan setiap penambahan stok kapital akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pada ahirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

¹⁰Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*, UPP AMP YPKN, Yogyakarta, 1997, hlm. 215.

Berikut ini adalah perkembangan investasi yang ada di Provinsi Lampung:

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Dalam Milyar Rupiah)
dan PMDN (Dalam Dollar Amerika) Provinsi Lampung
Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 1.1 diatas mengenai perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN Provinsi Lampung, bahwa peningkatan dan penurunan dalam hal investasi yang terjadi masih berfluktuasi. PMA tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai mencapai 307.000.000 US\$, sedangkan untuk PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan angka mencapai Rp302.447.000.000,-. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena kenaikan investasi yang terjadi akan mendorong terjadinya peningkatan

pertumbuhan produk domestik bruto yang ada dan nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menaikkan taraf hidup masyarakat.

Pemberlakuan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan Nasional Republik Indonesia.¹¹ Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memotifasi masyarakatnya untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya masing-masing dan dilaksanakan secara terpadu dan serasi agar pembangunan di setiap daerah dapat maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan melalui kerjasama pemerintah dan masyarakatnya.

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbanyak jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara untuk menambah produksi.

Berikut ini adalah penyerapan tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

¹¹Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, *Tentang Peraturan Pemerintah Daerah*, pasal 2 ayat 2.

Tabel 1.2
Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Tahun	Tenaga Kerja
2013	3.681.084
2014	3.857.936
2015	3.832.108
2016	4.121.668
2017	4.073.034

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 1.2 di atas jumlah tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terserap akan semakin meningkatkan jumlah hasil dari produk atau jasa yang dihasilkan di suatu daerah yang ada sehingga kegiatan ekonomi yang ada akan meningkat.

Komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan dipeson oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolut PDRB.

Berikut ini adalah realisasi belanja pemerintan yang ada di provinsi lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 1.3

**Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung
Periode 2013-2017**

Tahun	Total Belanja
2013	1.847.107.847
2014	2.004.899.187
2015	2.566.078.806
2016	4.354.050.898
2017	3.884.534.953

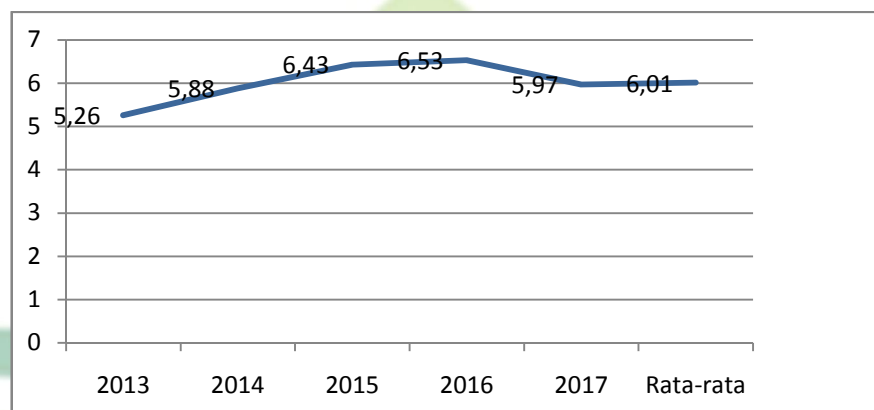
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung
2008-2017

Belanja pemerintah di Provinsi Lampung secara keseluruhan di dapat dari belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya terlihat dalam lima tahun terakhir belanja pemerintah selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sampai 2017 yaitu sebesar Rp. 1.847.107/847 meningkat sebanyak Rp. 3.884.534.953 pada tahun 2017 peningkatan ini terjadi secara berfluktuatif setiap tahunnya.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan mencukupi kesejahteraan masyarakat. Masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era reformasi dimana

masing-masing daerah memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Berikut laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Adapun disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Gambar 1.1
Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Lampung
(dalam persentase)



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Dari gambar 1.1 diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu lima tahun terahir pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 6,53% sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2013 dengan laju prtumbuhan ekonomi sebesar 5,26%. Melihat hal tersebut pemerintah harus lebih tanggap dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung lebih baik lagi agar pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung bisa lebih meningkat dari daerah-daerah lain yang ada di Pulau Sumatera.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh pemerintah daerah dalam mensukseskan perekonomian daerahnya melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasionalnya terutama dalam era otonomi luas sekarang ini.

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi dengan berbagai kekayaan alamnya tentu memiliki potensi yang strategis dalam bidang investasi, ada beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi Lampung mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktifitas penanaman modal khususnya PMA karena banyaknya tersedia berbagai bahan mentah dari berbagai sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan penggalian dari hasil bumi, kehutanan dan juga potensi daerah yang dapat dijadikan objek wisata sehingga potensi-potensi daerah ini dapat diberdayakan maka akan sangat besar manfaatnya untuk menambah devisa negara dan terciptanya kegiatan ekonomi disekitar daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Dengan letak geografis yang berada di Selatan Pulau Sumatera telah menempatkan Provinsi Lampung pada posisi yang strategis, terutama sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Provinsi Lampung memiliki

potensi sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional yang ditunjang dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Lampung.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Disisilain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian. Provinsi Lampung terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 Kota. Selama lima tahun terakhir Perekonomian Lampung didominasi oleh 4 (empat) sektor unggulan kegiatan ekonomi, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi.¹² Dengan potensi ini memungkinkan Provinsi Lampung menjadi lahan yang strategis bagi investor untuk menginvestasikan asetnya, yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada kepemilikan modal sehingga akan memudahkan untuk melakukan pengembangan/peluasan pada aset yang dimiliki yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang dilihat dari nilai PDRB yang ada.

Penelitian mengenai pengaruh tingkat investasi dan belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitrah Afrizal yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja

¹²Sumber: Katalog BPS, *Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung*, BPS, Lampung, 2014, hlm. 27.

Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan”¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat investasi, dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Trias Fajar Novianto yang melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pendapatan asli daerah, investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB, variabel investasi terhadap pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB berpengaruh positif.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh tingkat investasi dan belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Lampung itu sendiri, adapun Judul skripsi ini yakni: **“Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2017”**

¹³Fitrah Afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011*, Penelitian Terdahulu, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui besaran pengaruh investasi, Tenaga Kerja dan belanja pemerintah terhadap PDRB di Lampung
- b. Untuk mengetahui bagaimana investasi, tenaga kerja dan belanja pemerintah Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam

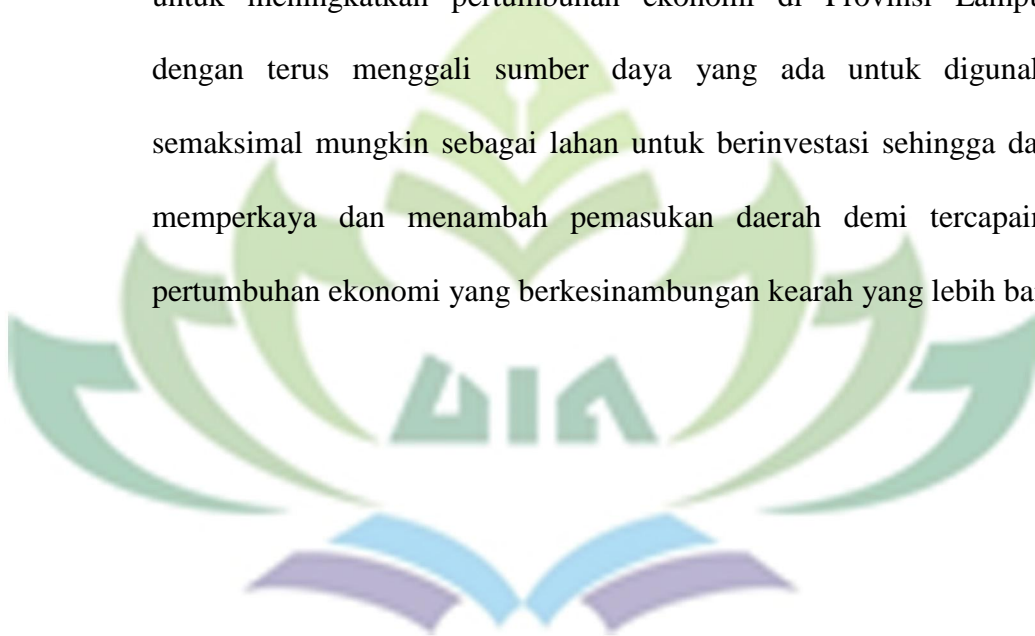
2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai tingkat investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta realisasi belanja pemerintah di Provinsi Lampung dan pengaruhnya terhadap PDRB di Lampung. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta gambaran kepada masyarakat umum tentang perekonomian Lampung pada investasi asing dan belanja pemerintah. Sehingga masyarakat umum mengetahui pengaruh tingkat investasi dan belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dengan terus menggali sumber daya yang ada untuk digunakan semaksimal mungkin sebagai lahan untuk berinvestasi sehingga dapat memperkaya dan menambah pemasukan daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan kearah yang lebih baik.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sadono pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah.¹ Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan *output* nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.²

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

¹ Sadono Sukirno, *Loc.Cit.* h.9

² M. Zahari, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi". *Jurnal Of Economics And Business*, Vol.1 No.1 (September 2017), h.8

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.³

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.⁴

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian

³ Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2008, hlm. 44-45.

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.⁵

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.⁶

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi

⁵ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

⁶ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 44.

(institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal.⁷

Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi,⁸ Ketiganya adalah:

- a) Akumulasi Modal
- b) Pertumbuhan Penduduk
- c) Kemajuan Teknologi

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).⁹

- a) Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat

⁷Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm. 12.

⁸ Todaro, *Op.Cit*, hlm. 92

⁹ Fitrah afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*,Makasar,hlm.12.

dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.

- b) Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.
- c) Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara/wilayah diukur berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)

untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama periode tertentu. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diperoleh melalui tingkat pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan membandingkan PDRB Riil pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}).¹⁰

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

PDRB_t = PDRB Riil pada tahun t

PDRB_{t-1} = PDRB Riil tahun sebelumnya

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Zahari, *Op.Cit*, h.7

¹¹ Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

a. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketidakseimbangan pendapatan yang terjadi disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata. Hal itu salah satunya disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang terutama banyak terjadi didaerah perkotaan, dan sisanya di daerah pedesaan. Apabila ketidakseimbangan pendapatan yang terjadi dapat diatasi maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat merata.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industry akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat

penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

Dari penjasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat akan menyebabkan perubahan struktur perekonomian yang mengakibatkan banyak masyarakat desa semakin tertinggal dikarenakan tidak siap dengan perkembangan sektor industri yang semakin pesat, sedangkan orientasi mereka masih pada sektor pertanian. Sehingga mengakibatkan mereka kurang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang ada.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis *financial* Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan

produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang ada harus dibarengi dengan perubahan infrastruktur yang ada, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang ada akan membuat mobilitas yang ada semakin cepat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan bertujuan membuat mobilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi semakin mudah dan cepat, sehingga menjangkau ke semua kalangan.

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).

3. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, Ada 4 (empat) Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:¹²

a. Akumulasi modal

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal fisik suatu Negara sehingga pada gilirannya akan memungkinkan Negara tersebut untuk mencapai output yang lebih besar. Investasi ini sering diklarifikasikan sebagai investasi disektor produktif. Investasi-investasi lainnya dikenal dengan sebutan infrastruktur social ekonomi yaitu jalan raya, listrik, air dan komunikasi mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Investasi modal insani juga dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan juga akan mempunyai pengaruh yang sama atau bahkan lebih besar terhadap kapasitas produksi. Investasi pada modal manusia akan memperbaiki kualitas sekaligus

¹² Lincolin'' Arsyad, *ekonomi pembangunan*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2015), h. 270-

meningkatkan produktifitas sumberdaya-sumberdaya yang ada melalui investasi yang strategis.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian.

c. Tingkat Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada.

d. Sumber daya institusi (system kelembagaan)

Menurut North peran institusi dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat netral. Institusi adalah aturan-aturan

yang mengatur interaksi politik, ekonomi, dan social. Institusi terdiri dari aturan informal (adat istiadat, tradisi, norma, social dan agama) dan aturann formal (konstitusi, undang-undang,dan aturan-aturan).

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatann ekonomi, organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wirausahawan tampil sebagai organisator dan mengambil resiko dalam menghadapi ketidakpastian, menurut Schumpeter seorang wirausahawan tidak perlu seorang kapitalis, fungsi utamanya adalah melakukan pembaruan (inovasi), Dengan demikian masyarakat akan bebas dalam berinovasi dan mengembangkan segala potensinya yang dimilikinya, sehingga akan tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari penambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun.

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ekonom Klasik, Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi. Unsur pokok dari faktor produksi suatu negara ada tiga :

- 1) Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
- 2) Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
- 3) Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Menurut ekonomi Klasik, Adam Smith inti dari ajarannya adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan.

Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada *Full Employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (*stationary*). Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian.¹³

Menurut pandangan Adam Smith, kebijaksanaan *Laissez-faire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Corak dan proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, bahwa apabila pembangunan sudah terjadi maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif.¹⁴

Dalam pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang dilakukan. Walaupun menyadari pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Perkembangan Ekonomi Rustow

Model pembangunan tahapan pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rostow dalam Todaro menjelaskan bahwa pada perubahan dari

¹³ Robinson Taringan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.4

¹⁴ Athaillah, Abubakar Hamzah, dan Raja Masbar, *Op.Cit*, h.4

keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Menurut teori ini negara-negara maju telah melalui tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang berlangsung dengan sendirinya tanpa diatur secara khusus. Rostow dalam Todaro juga menjelaskan negara-negara yang sedang berkembang atau yang masih terbelakang, pada umumnya masih berada dalam tahapan masyarakat tradisional atau tahapan kedua, yaitu tahap penyusunan kerangka dasar tinggal landas. Tidak lama lagi, hanya tinggal merumuskan serangkaian aturan pembangunan untuk tinggal landas, mereka akan segera bergerak menuju ke proses pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan.

Menurut Rostow proses pembangunan dapat dibedakan ke dalam lima tahap, yaitu¹⁵:

- 1) Masyarakat Tradisional, ciri ekonomi yang utama masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang dengan fungsi produksi yang terbatas yang terefleksikan pada skala dan pola perdagangan/pertukaran yang kecil dan tradisional, tingkat *output* pertanian dan produktivitasnya yang rendah, ukuran industri manufaktur yang kecil, fluktuasi penduduk yang tidak menentu dan pendapatan riil yang rendah.

¹⁵Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.63-69

- 2) Tahap Prasyarat Lepas Landas, Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai tahap pertumbuhan yang berkesinambungan dengan kekuatan sendiri (*self sustained growth*).
- 3) Tahap Lepas Landas, pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, misalnya terjadi revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut adalah terciptanya inovasi-inovasi dan kenaikan investasi cukup besar.
- 4) Tahap Menuju Kedewasaan, tahap ini diartikan Rostow sebagai suatu tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. pada tahap ini, sektor-sektor pemimpin baru akan muncul dan menggantikan pemimpin lama yang mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kondisi alam, karakteristik dari tahap sebelumnya (tahap lepas landas), dan juga kebijakan pemerintah.
- 5) Tahap Konsumsi Tinggi, pada tahap ini perhatian masyarakat lebih ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan (*demand side*), dan bukan lagi pada masalah produksi (*supply side*).

Meskipun secara konseptual cukup menarik, tetapi argumen-argumen dasar mengenai pembangunan yang terkandung dalam teori Rostow seringkali tidak berlaku di dunia nyata. Alasan utama tidak berlakunya teori tersebut adalah karena pembangunan bukanlah sebuah proses yang statis, sebaliknya pembangunan adalah sebuah proses yang dinamis.

Kenyataannya, ada beberapa negara di dunia (misalnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand) yang tidak melewati tahap tradisional dari Rostow, namun langsung pada tahap prasyarat untuk lepas landas. Hal ini terjadi karena negara-negara tersebut terlahir dalam tatanan institusi yang baik, yang ditandai oleh struktur ekonomi yang modern, institusi sosial-politik yang bekerja dengan baik dan yang terpenting kondisi masyarakat yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain pada saat mereka baru merdeka.¹⁶

Teori modernisasi banyak ditetapkan di negara-negara dunia ketiga, salah satunya adalah Indonesia. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto sangat jelas menerapkan model pertumbuhan ekonomi Rostow melalui Perancangan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah Orde Baru memang sangat mujarap untuk mendongkrak pembangunan dan pertumbuhan pendapatan penduduk per kapita (GNP). Namun

¹⁶ *Ibid.* h.69

sesungguhnya kemajuan dan pertumbuhan tersebut bersifat semu, sebab kemiskinan riil yang ada di masyarakat makin parah dan perekonomian negara yang rapuh.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan model pembangunan lima tahap yang dikemukakan oleh Rostow yaitu masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Disebutkan oleh Rostow bahwa semua negara dikatakan maju apabila telah melewati tahap lepas landas dan negara berkembang berada pada tahap persiapan menjadi negara maju). Menurut Rostow suatu negara untuk mencapai suatu tahap tertentu harus melewati tahap demi tahap perjalanan hidupnya sehingga akhirnya berada pada tahap tersebut. Kenyataannya tidak semua negara di dunia tidak melewati tahap-tahap sebelumnya. Hal ini dikarenakan beberapa negara memiliki karakteristik ekonomi, sosial dan politik yang berbeda-beda.

Rostow dan Musgrave dalam Guritno Mangkoesobroto menghubungkan model tahap-tahap pembangunan dengan pengeluaran pemerintah, sehingga kemudian dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, jumlah investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan sangat dominan dan dalam jumlah yang besar, hal ini disebabkan pada tahap ini pemerintah harus

¹⁷Dita Hanipah, "Pembangunan Ekonomi Era Orde Baru" (On-Line), tersedia di :https://www.kompasiana.com/dita_hanipah/pembangunan-ekonomi-era-ordebaru_56f88vbf587b613b048b456f (28 Maret 2016).

menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap kedua, peran pengeluaran pemerintah dalam pembangunan sudah mulai tergeser dengan adanya investasi yang dilakukan oleh sektor swasta, namun demikian pada tahap ini pemerintah tetap memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan, hal ini disebabkan jika peran swasta dibiarkan mendominasi pembangunan akan berdampak pada munculnya kekuatan monopoli dan kegagalan pasar, sehingga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih besar.

Tahap kedua perkembangan ekonomi ini menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya tingkat polusi lingkungan dan juga berpeluang untuk terhadap timbulnya masalah eksploitasi buruh, sehingga dalam hal ini diperlukan campur tangan pemerintah untuk meminimalisasi dampak buruk dari pembangunan ekonomi yang semakin maju. Pada tingkat yang lebih lanjut, Rostow dalam Todaro mengatakan bahwa dalam pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana dan prasarana menjadi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan masyarakat dan sebagainya.

c. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori pertumbuhan endogen ini dipelopori Paul M Romer dan Robert Lucas, teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam system ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia. Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal atau kapital diperluas dengan memasukkan model ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.¹⁸ Pada saat ini tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun beberapa teori secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Harrod Domar

Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.¹⁹ Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Pertumbuhan suatu sektor tergantung pada stok barang modal pertenaga kerja, tingkat keahlian tenaga kerja dan perubahan teknologi serta skala ekonomi yang pada gilirannya akan menentukan keunggulan komparatif suatu sektor.

Pada hakikatnya, teori Harrod-Domar merupakan pengembangan teori makro Keynes. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi.

¹⁸ Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Edisi Ketiga. STIE YKPN. 1999), h. 90

¹⁹ Jhingan, L.M, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Edisi Keenam Belas. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 241.

Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan. Dalam teori Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan menambah permintaan efektif masyarakat.²⁰

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi klasik yakni:

- 1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (*full employment*).
- 2) Tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan.
- 3) Rasio antara modal dan produksi (*capital output ratio*) adalah tetap.
- 4) Perekonomian adalah terdiri dari dua sektor.

Dalam analisis yang dilakukan Keynesian adalah persoalan ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam analisis Harrod Domar merupakan analisis ekonomi jangka panjang. Dalam analisis Harrod – Domar dapat dilihat bahwa:

- 1) Dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila $I + G + (X-M)$ terus menerus bertambah dengan tingkat yang tinggi.²¹

²⁰ Lincolin Arsyad, *Op.Cit.*h.83

²¹ Kurnia Maharani, Sri Isnowati, “Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, Vol. 21, No. 1(Maret 2014), h. 64.

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan dan material) yang rusak, namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan *output* total (Y), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan *output* total sesuai dengan rasio modal *output* tersebut, hubungan ini dikenal dengan istilah rasio modal *output* (COR).²²

Penerapan teori Harrod Domar di Indonesia dapat dilihat melalui program yang diluncurkan pada tahun 2011 yaitu Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011-2025 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Indonesia. Dimana tabungan dan investasi merupakan hal yang perlu ditingkatkan, tingginya tabungan dan investasi akan memperbesar kemungkinan modal bagi masyarakat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang tertulis dalam program MP3EI, percepatan transformasi ekonomi dititikberatkan pada pendekatan peningkatan *value added*, mendorong investasi,

²² Athaillah, Abubakar Hamzah, dan Raja Masbar, *Op.Cit*, h. 4.

mengintegrasikan sektoral dan regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya.²³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut teori Harod-Domar, dalam jangka panjang investasi atau pembentukan modal adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang dan menambah permintaan efektif masyarakat. Tingginya tabungan dan investasi memungkinkan modal bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak yang ditabung dan diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat.

5. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi.

Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya

²³Gabi Haifa Nadhira, "Teori Pembangunan Yang Sesuai Untuk Indonesia" (On-Line), tersedia di : <http://Mutosagala.Wordpress.Com/2012/03/05/230/> (di Unduh Pada 17 Maret 2018).

mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.²⁴

Menurut Abdurrahman Yusro²⁵, pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh10-12:²⁶

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ لَّكُمْ تَجْرُلُ مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai” (Qs. Nuh : 10-12)

²⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 124.

²⁵ *Ibid*, hlm. 139.

²⁶ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponogoro, 2010, hlm. 570.

Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S Al-Ar'raaf 96²⁷ :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : *“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”*. (QS. Al-Ar'raaf : 96)

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

6. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

²⁷ Ibid, hlm. 151

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, Faktor-faktor tersebut adalah:²⁸

a. Stabilitas Ekonomi, Politik dan Sosial

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

b. Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi taupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino.

²⁸ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004, hlm. 142.

c. Efisiensi Produksi

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Urgensi Pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negaranegara berkembang adalah, segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana *supply* produk yang dihasilkan. *Market share* yang dimiliki sangat kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar. Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perdagangan internasional yang menyudutkan bagi langkah negara-negara berkembang.

Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju. Dengan adanya *market share* yang relatif sempit, akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDRB. Untuk mengatasi hal tersebut,

negaranegara berkembang bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah mekanisme pasar pada kawasan tertentu guna menggairahkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.²⁹

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

²⁹ *bid*, hlm. 144.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.³⁰

a. Pendekatan Produksi

Menurut Ischak P. Lumbantobing, Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).³¹

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha³² yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih
- 5) Bangunan dan Konstruksi
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi

³⁰ BPS, *Op.Cit*, hlm. 7

³¹ Ischak P. Lumbantobing, "Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto Di Dki Jakarta". *Journal Of Research In Economics And Management (Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, Volume 17, No. 1, Januari – Juni, h.3

³² Katalog BPS, *PDRB Tahun 2010*, hlm. 3

8) Jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

9) Jasa-Jasa Lainnya

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

(1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), (5)

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir³³, dari:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
- 2) Konsumsi Pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
- 4) Pembentuk Stok
- 5) Ekspor netto (ekspor dikurang impor)

c. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga

³³ *Ibid*, hlm. 5

modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha.

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan

cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah di cakup pajak tak langsung neto.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan presentase PDB (nasional) maupun PDRB (kabupaten/provinsi). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode. Dalam perhitungannya terdapat tiga pendekatan untuk menghitung angka-angka PDRB yaitu dengan pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Apabila terjadi kenaikan presentase nilai PDB/PDRB maka akan mempengaruhi perubahan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun kabupaten/provinsi.

C. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Investasi tercipta dari penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak dengan tujuan memperbesar *output*. Investasi yang lazim disebut dengan penanaman modal berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara bahkan wilayah.

Penanaman modal/investasi sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang

modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.³⁴

Menurut Smith, Investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan keuntungan, dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Menurut teori Neo Klasik, suatu investasi akan dijalankan apabila pendapatan lebih besar dari tingkat bunga, dan investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan jika biaya sewa ditambah bunga lebih kecil daripada hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut.

Teori Keynes menyatakan Masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi oleh Keynes didasarkan atas konsep *Marginal Eficiency of Investment* (MEI) lebih tinggi daripada tingkat bunga. Menurut teori Klasik, investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat, dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

Faktor biaya modal berupa tingkat bunga dan keuntungan yang diharapkan dari investasi, adapula faktor lain yang turut mempengaruhi

³⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.121.

keputusan seorang investor untuk melakukan investasi antara lain pajak, perkembangan teknologi, penambahan penduduk, akumulasi modal serta perkiraan dan harapan (*expectation*) tentang situasi ekonomi di masa depan.³⁵

Di dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*Fixed Asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal, seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.³⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dengan tujuan untuk mengganti, meningkatkan stok dan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Dalam struktur Produk

³⁵ Andika Ika Fahrika, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Melalui Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ecces Economics, Social, And Development Studies, VOL. 3NO. 2, Desember2016, h. 48-49.

³⁶ Katalog BPS, *Op.Cit.* h.27-28

Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran investasi didefinisikan sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kaitannya erat dengan aset tetap, dimana investasi disini merupakan salah satu faktor untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah.

2. Teori Investasi

Menurut Sukirno dalam Sayekti, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (a). investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, (2). penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. (3). investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.³⁷

Menurut N.Gregory Mankiw teori investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi. Sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi. Ada tiga jenis pengeluaran investasi yaitu investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Investasi residensial (*residential investmen*) mencakup rumah baru yang orang beli

³⁷ Sayekti Suindiyah D, *Lok.Cit.*

untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan digudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.³⁸

Todaro mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang paling penting yaitu:

1. Akumulasi modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja.
2. Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan
3. Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) akan terjadi jika sebagian tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk meningkatkan *output* dan pendapatan di masa depan.³⁹

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes, menitikberatkan pada peranan tabungan dan investasi sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar, secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP (\dot{Y}/Y) ditentukan oleh rasio tabungan nasional neto, s , dan rasio modal *output* nasional, e secara bersama. Secara lebih spesifik, teori menyatakan bahwa dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka tingkat

³⁸ *Ibid*, h. 476.

³⁹ Todaro, *Op.Cit.* h. 170

pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau positif akan berkaitan dengan rasio tabungan (yaitu, semakin besar bagian GDP perekonomian yang dapat ditabung dan diinvestasikan, semakin besar pula pertumbuhan GDP) dan berbanding terbalik atau negatif berkaitan dengan rasio modal *output* perekonomian (yakni, semakin tinggi c , semakin rendah pula pertumbuhan GDP).

Dari uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara adalah akumulasi modal. Dalam hal ini yang termasuk dalam akumulasi modal baik yang berbentuk tanah, peralatan fisik, sumber daya manusia maupun teknologi yang ditabung atau di investasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan dikemudian hari. Investasi merupakan salah satu penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan *output*, juga secara otomatis akan meningkatkan *input* sehingga gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat.

3. Jenis-jenis Investasi

Berdasarkan sumbernya yang digunakan, investasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut ⁴⁰ :

a. Investasi Negara

Investasi ini adalah investasi yang dilakukan oleh Negara, atau sumber daya invesatsi tersebut berasal dari milik atau kekayaan Negara.

⁴⁰ Henry Faizal Noor, *Economy Public (Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, cet.pertama (Jakarta : PT Indeks, 2005), h. 49.

Dalam pelaksanaanya investasi ini dilakukan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat nirlaba atau *non profit motive*, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, sekolah, taman, pasar, listrik, rumah sakit, pelabuhan, Bandar udara (bandara), terminal, alat pertahanan Negara, kantor pemerintahan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dana atau pembiayaan yang dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan oleh negara lebih bersifat kepada pelayanan umum untuk kesejahteraan masyarakat yang dimana masyarakat dapat menikmatinya dengan mudah. Investasi yang dilakukan oleh negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmurann dan kesejahteraan masyarakat.

b. Investasi Swasta

Investasi ini Adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi atau perusahaan seperti :

- a. Usaha Mikro (belum punya badan hokum),
- b. Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagian sudah berbadan hokum,

c. Usaha Besar yang berbentuk PMA maupun PMDN.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, investasi swasta yang dilakukan adalah untuk umum dan masyarakat yang ingin mengembangkan dan berkontribusi untuk negara, karena dengan investasi yang dilakukan akan menciptakan efek multiplier yang akan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada.

4. Manfaat dan Tujuan Investasi

Investasi merupakan salah satu pembentuk pertumbuhan ekonomi yang berperan dalam peningkatan struktur ekonomi dan pembangunan negara. Hal ini karena kegiatan investasi dapat menyumbang pendapatan tidak hanya negara tapi juga masyarakat. Secara khusus investasi memiliki manfaat terhadap perekonomian suatu daerah antara lain sebagai berikut :

a. Investasi yang bermanfaat untuk umum (Publik)

Pada dasarnya hamper semua bentuk investasi, bermanfaat bagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya adalah investasi di bidang pendidikan dan sumber daya manusia, investasi di bidang kesehatan, investasi di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, energi dan sebagainya), investasi di bidang konservasi alam, investasi di bidang pengolahan sampah, yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

- b. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu (pribadi atau rumah tangga)

Investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu dan lingkungan tertentu, bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu, bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu, sedangkan investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga, misalnya investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, investasi untuk usaha (mendapat penghasilan), serta investasi di bidang lain yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga.⁴¹

Tujuan investasi pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut⁴² :

- 1) Membuka lapangan kerja bagi pekerja yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
- 2) Memberikan pendapatan bagi pekerja sehingga dapat mengurangi kefakiran dan kemiskinan penduduk.
- 3) Memberikan jaminan ketentraman, ketenangan, kesejahteraan serta kebahagiaan hidup para pekerja dan keluarganya.

⁴¹ *Ibid.*, h.47.

⁴² Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.74.

- 4) Berorientasi pada produksi barang dan jasa yang tidak mendatangkan mudharat bagi umat manusia termasuk alam dan segala isinya.

5. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pengertian penanaman modal asing menurut Hulman Panjaitan adalah suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*) yang ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri.⁴³

Negara yang sedang berkembang umumnya berkeyakinan bahwa pembangunan ekonominya akan dapat dikembangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing. Modal tersebut dimanfaatkan ke dalam sektor-sektor yang cukup produktif. Untuk aliran modal asing yang lebih besar lagi perlu diciptakan iklim yang baik sehingga modal asing tersebut dapat disertakan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, persyaratan-persyaratan mengenai masuknya modal asing perlu dipersiapkan sebaik-baiknya.⁴⁴

Menurut Arsyad manfaat investasi asing atau penanaman modal asing bagi Negara sedang berkembang, antara lain : untuk menciptakan lapangan kerja; proses ahli teknologi dan ketrampilan yang bermanfaat;

⁴³ Harjono, D. K, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.47.

⁴⁴ Sumantoro, *Aspek-aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia* (Jakarta : Bina cipta,1989) h.97.

sumber tabungan atau devisa; Dengan adanya penanaman modal asing dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, selain itu dengan adanya investasi asing akan mendapatkan ketrampilan baru bagi Negara sedang berkembang. Penanaman modal asing juga merupakan sumber tabungan karena dengan adanya investor asing yang menanamkan modalnya maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.⁴⁵

Peranan penanaman modal asing adalah bersifat komplementer dan diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan. Sebagaimana diketahui pembangunan ekonomi berarti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan kecakapan manajemen, teknik dan organisasi. Pelaksanaannya harus diusahakan berdasarkan kemampuan yang ada di dalam negeri agar tidak merugikan kepentingan nasional. penanaman modal asing harus diarahkan menurut bidang-bidang yang telah ditetapkan prioritasnya oleh pemerintah yaitu untuk sektor-sektor sebagai berikut :

- a. Usaha yang membutuhkan modal swasta sangat besar dan teknologi tinggi;
- b. Usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi;
- c. Usaha pendirian industri-industri dasar;
- d. Usaha yang sifatnya menciptakan lapangan pekerjaan;
- e. Usaha yang menunjang peningkatan penerimaan negara;

⁴⁵ Sri Asiyani, *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*, Jurnal Fakultas Ekonomi, Unesa, h.7.

- f. Usaha yang menunjang penghematan devisa atau pengganti impor;
- g. Usaha yang menunjang penyebaran pembangunan daerah.

6. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam UU No.6 Tahun 1968 yang di revisi menjadi UU No.25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Menurut ketentuan penanaman modal tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Manfaat Penanaman Modal dalam Negeri, adalah sebagai berikut: mampu menghemat devisa; mengurangi ketergantungan terhadap produk asing; mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang; memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.⁴⁶

Usaha pengembangan penanaman modal dalam negeri telah dirintis oleh pemerintah, salah satunya dengan kebijakan kredit investasi. Pemberian kredit investasi memerlukan keahlian dalam prioritas pembangunan. Sebuah pengalaman menunjukkan bahwa penyaluran kredit investasi sering didasarkan pada perintah atau komando dari atasan. Hal

⁴⁶ Sri Asiyani, *Op.Cit.*, h.6.

demikian telah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dimana terjadi pemborosan keuangan negara dan pengaruhnya kepada laju inflasi.

7. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang muslim yang menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, karena dalam perekonomian islami semua aset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, investor muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan.⁴⁷

Selain itu, dengan adanya kegiatan investasi juga memungkinkan suatu masyarakat akan terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.⁴⁸

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, investasi dalam Islam sangat penting bagi kepentingan dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2) : 261

⁴⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cetakan ke 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.297.

⁴⁸ Sadono, *Op.Cit*, hlm.225

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
 سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁴⁹

Ayat ini merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termasuk menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini jika dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Bayangkan jika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.⁵⁰

Dalam melakukan investasi menurut Metwally dalam Khairina Tambunan, seorang muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, yaitu memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*middle cash*), memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa berproduksi seperti deposito, real estate, permata atau menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional.⁵¹

⁴⁹ Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS Al-Baqarah (2): 261.

⁵⁰ Sakinah, "Investasi Dalam Islam", *Iqtishadia*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), h. 252.

⁵¹ Khairina Tambunan, "Analisis Pengaruh Investasi, Operasi Moneter Dan Zis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *At-Tawassuth*, Vol. 1, No.1 (2016: 73-94), H.74

Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga, hal ini tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Islam melarang pembayaran bunga pada semua jenis pinjaman (pribadi, komersial, pertanian, industri, dan lainnya) walaupun pinjaman-pinjaman ini dilakukan untuk teman, perusahaan swasta maupun publik, pemerintahan atau entitas lainnya.

Investasi syariah tidak hanya berorientasi pada persoalan duniawi sebagaimana yang dikemukakan para ekonom sekuler. Ada unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah.

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 34:⁵²

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat

⁵² Departemen Agama, RI, *Op.Cit*, hlm. 411

mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Luqman : 34)

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Islam memadukan antara dimensi dunia & akhirat. Setelah kehidupan dunia yang fana, ada kehidupan akhirat yang abadi. Setiap muslim harus berupaya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sarana dan masa yang harus dilewati untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat. Konsep di atas bukanlah hal yang bisa diremehkan, dimana antara urusan dunia dengan akhirat tidak bisa dipisahkan. Sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar, termasuk salah satunya pada urusan ekonomi.

Oleh karena itu, investasi sebagai salah satu bahasan yang ada pada ilmu ekonomi, tentunya juga memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi, investasi yang islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*). Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

D. Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga kerja adalah setiap orang yang termasuk angkatan kerja dan sudah bekerja guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁵³

Simanjuntak mengelompokkan tenaga kerja menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) terdiri dari golongan yang bekerja dan menganggur atau yang mencari pekerjaan. Golongan yang bukan angkatan kerja terdiri dari yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain yang menerima pendapatan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.⁵⁴

Menurut BPS penduduk berumur 15 keatas terbagi sebagai tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu.

Kesempatan kerja dan jumlah serta kualitas orang yang digunakan dalam pekerjaan mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan. Ini bukan hanya karena tenaga kerja tersebut merupakan pelaksana pembangunan, akan tetapi juga karena mereka bekerja atau pekerjaan merupakan sumber utama bagi masyarakat.

⁵³ Undang-Undang Republik Indoneis No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

⁵⁴ Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Jakarta, 2003), h. 78

Perluasan akan kesempatan kerja selain akan memberikan pendapatan sekaligus akan mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan atas lapisan masyarakat. Sebaliknya jumlah angkatan kerja yang tinggi bila tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, otomatis akan menjadi beban bagi pembangunan. Sehingga yang terjadi yaitu peningkatan angka pengangguran, yang juga akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita suatu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perluasan kesempatan kerja hanya dapat dilakukan dengan jalan memperluas kegiatan ekonomi yang disertai dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi, sehingga pemerataan kesempatan kerja bagi penduduk dapat terealisasi.

Tujuan adanya perluasan kesempatan kerja adalah: (1). Menurunkan tingkat pengangguran yang terbuka maupun yang tersembunyi: (2). Berkembangnya kesempatan kerja yang semakin mampu menyerap angkatan kerja baru: (3). Menurunkan beban ketergantungan setiap orang yang bekerja. Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja baru berarti adanya penciptaan pendapatan masyarakat yang akan mendorong *induced investment*, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.⁵⁵ Permintaan tenaga kerja juga mengidentifikasi adanya determinasi permintaan tenaga kerja antara lain: (1). Tingkat upah, (2). Teknologi, (3). Produktivitas, (4). Kualitas tenaga kerja, (5) Fasilitas modal.⁵⁶

⁵⁵Evi Grafitani, *Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Kota Yogyakarta*, (Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 2006).

⁵⁶Afrida B. R, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Edisi pertama, Ghalia Indonesia Jakarta, 2003), h. 89.

Masalah ketenagakerjaan ini dikemukakan oleh Lewis mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain.⁵⁷

Faktor produksi manusia sifatnya berubah-berubah, nilai tenaga kerja yang dicerminkan dengan upah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia tersebut. Makin tinggi kualitas tenaga kerja tersebut, maka makin tinggi pula upah yang diterima, dan sebaliknya jika kualitas tenaga kerja tersebut rendah, maka tingkat upah yang diterima juga rendah. Selain itu, tenaga kerja yang berkualitas akan mampu untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Teori yang berkaitan dengan tenaga kerja yaitu teori Adam Smith bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsabangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelolanya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga melihat bahwa alokasi sumberdaya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.⁵⁸

Sumberdaya manusia mengandung dua pengertian, yaitu: (1). Sumberdaya manusia yang mengandung pengertian usaha kerja, artinya sumberdaya

⁵⁷Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan*. (Diterjemahkan oleh Haris Munandar Edisi kelima. Bumi aksara Jakarta.2000), h.167.

⁵⁸ Mulyadi, *Ekonomi Sumber daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Raja Grafindoo Persada, 2002).

manusia yang mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. (2). Sumberdaya manusia yang menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Pengertian mampu bekerja adalah mampu untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis yang berupa barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

E. Belanja Pemerintah

1. Pengertian Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah dari penggunaan ekonomi secara langsung yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat dalam arti seluas-luasnya.⁵⁹ Belanja pemerintah daerah tercermin dari belanja daerah yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Belanja pemerintah sama hal nya dengan pengeluaran pemerintah. Menurut definisi belanja pemerintah diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu Negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.⁶⁰ Belanja pemerintah menjadi bagian penting dari perekonomian makro suatu negara, karena menentukan kemana kondisi ekonomi negara akan dibawa.

⁵⁹ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 174

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 175

Oleh karen itu, belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi Belanja Pemerintah

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.⁶¹

Pengeluaran pemerintah Indonesia menurut menurut Dumairy⁶² diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *pertama* pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, *kedua* pengeluaran pembangunan yaitu, pengeluaran yang dikeluarkan yang bersifat untuk menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik yang nantinya akan menimbulkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai program-program pembangunan dengan anggaran yang sudah disesuaikan yang sudah terealisasi.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 71

⁶² Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, cet Kelima, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 44

Secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan, dan melaksanakan kebijakan stabilisasi pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi.⁶³

3. Belanja Pemerintah dalam Islam

Negara sesungguhnya sangat berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Apabila ada rakyat yang menganggur atau miskin atau terluntalunta tanpa keluarga dan sanak famili, maka Negara wajib membantu dan menyelamatkan mereka dengan pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk pemberdayaan maupun dalam bentuk santunan.⁶⁴

Dalam perspektif teori ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dibuat karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar (*market failure*). Kegagalan mekanisme pasar yang terus terjadi akan menimbulkan distorsi atau gangguan dalam hal penawaran dan permintaan yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan dari permintaan agregatif (AS) dan penawaran agregatif (AD) pada perekonomian tersebut.⁶⁵

Kebijakan fiskal sudah dipraktekkan sejak awal terbentuknya masyarakat Muslim yakni sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1332-1406 M) misalnya berpandangan bahwa dalam satu kondisi untuk

⁶³ *Ibid*, hlm. 180

⁶⁴ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 66

⁶⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 235.

menyeimbangkan ekonomi pemerintah perlu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, karena pemerintah diilustrasikan oleh Ibn Khaldun sebagai pasar terbesar. Jauh sebelum Ibn Khaldun, Abu Yusuf (731-798 M), sebagaimana dikutip Adiwarman A. Karim, telah menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.⁶⁶ Adapun tujuan pembelanjaan dalam pemerintah Islam adalah:

- a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
- b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.

⁶⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 25.

- c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.⁶⁷

Islam menetapkan tingkatan yang mulia (tinggi) terwujudnya persamaan dan demokrasi, diantara prinsip-prinsip dan hukum yang lain, prinsip mendasar adalah agar kekayaan (harta) itu tidak hanya beredar diantara segelintir orang kaya saja. Hal ini mengambil tindakan bahwa ekonomi Islam harus lebih berperan dalam setiap anggota masyarakat. Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*⁶⁸

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Dikatakan pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan

⁶⁷ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.223-225.

⁶⁸ Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS Al-Hasyr (59): 7

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang.

Demikian pula apabila rakyat memerlukan fasilitas sarana dan prasarana maka negarapun wajib untuk mengadakannya. Karena itulah negara membutuhkan dana atau pembiayaan yang cukup untuk tujuan kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan rakyat pada umumnya. Dana tersebut adalah bersumber dari penghasilan negara atau kepemilikan negara yang ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam islam keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan keniscayaan yang mesti menjadi pegangan pemerintah di negara manapun. Dengan kata lain pemerintah sangat membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang halal, baik dari hasil negara yang diperoleh dari pajak maupun non pajak termasuk sumber dana dari keuntungan perusahaan negara.⁶⁹

4. Kebijakan Anggaran Belanja dalam Ekonomi Islam

Pada masa Rasulullah Saw kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 68

Saw.⁷⁰ Negara yang menganut demokrasi biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum tiap tahun, fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah, bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen.⁷¹

Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan dimasa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari system perbankan atau dari luar negeri.⁷² Telah kita lihat bahwa selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Jelaslah, dizaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. Pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi

⁷⁰ Taqyiddin An-nababan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm, 264

⁷¹ *Ibid*, hlm. 268

⁷² Abdul mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hlm, 235

yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa “kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin”⁷³ Zakat merupakan bentuk ibadah seperti amalan shalat setiap hari atau berpuasa sehingga kebanyakan orang berlomba-lomba mau menunjukkan melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin.⁷⁴

Terangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja menjadi suatu perbedaan yang mendasar mengenai system anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat, yang telah diserahkan oleh syara' dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Selain itu Kebijakan pengeluaran (pembelanjaan) tercermin diantarnya adalah untuk kepentingan yang diarahkan pada pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Serta dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain pembiayaan proyek ataupun pembangunan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbada dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek. Akan tetapi kebijakan pengeluaran pemerintah Islam maupun modern saat ini sama-sama dialokasikan pada kemaslahatan umat yaitu untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

⁷³*Ibid*, hlm. 238

⁷⁴*Ibid*, hlm. 335

5. Kaidah Belanja Negara dalam Ekonomi Islam

Kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah dikumpulkan. Dengan kebijakan pengeluaran inilah negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula maka negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat.⁷⁵ Pemerintah diharapkan dapat menggunakan keuangan tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketakwaan. Kebijakan pengeluaran harus bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa, dan status sosial.

Keberhasilan negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran sesuai tujuan yang disyaratkan syariah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena kebijakan pengeluaran tersebut adalah suatu proses distribusi pendapatan kepada masyarakat.⁷⁶

Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidahkaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah tersebut adalah:⁷⁷

⁷⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 98

⁷⁶ *Ibid*, hlm, 99

⁷⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam; Konsep, Teori dan Analisis*, Alfabet, Bandung, 2010, hlm, 234

- a. Kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah masalah
- b. Menghindari *masyaqqoh* kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum.
- d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Diantara tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam, yaitu:⁷⁸

- a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

⁷⁸ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf; Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Yogyakarta, 2003, cet. ke-1, hlm, 153.

Adapun belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, mencakup pengadaan infrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya.⁷⁹

Selanjutnya adalah belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Bentuk pembelanjaan seperti ini biasanya melalui mekanisme subsidi, baik subsidi langsung seperti pemberian bantuan secara cuma-cuma atau subsidi tidak langsung melalui mekanisme produksi barang-barang yang disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syariah yang memihak kepada kaum *fuqara* dalam hal kebijakan keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut mencapai tujuannya. Konsep tersebut di antaranya adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri, yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh orang kaya, atau subsidi dalam bentuk bantuan langsung.⁸⁰

F. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Investasi terhadap PDRB

Dalam skala makro, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori

⁷⁹ Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam*, Pustaka Ibadah, Jakarta, 2003, hlm, 243.

⁸⁰ *Ibid*, hlm.245

ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.⁸¹

Menurut Todaro⁸², persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk *output* dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam pembentukan modal untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat

⁸¹ Sadono, *Loc.Cit*

⁸² Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 92.

pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Harorrd dan Dommar memberikan peran kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan yang kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Arti pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan

yang positif antara pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara.⁸³

Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah *output* dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

2. Hubungan Tenaga Kerja terhadap PDRB

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbanyak jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara untuk menambah produksi.

Payaman J. Simanjuntak menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari

⁸³ Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi: Sebuah Pengetahuan Tingkat Dasar dan Menengah serta Advanced untuk Ilmu Ekonomi Makro*, cet Kedua, Beta Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 99.

pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, produktif serta memberikan imbalan dan penghargaan yang layak, mempunyai peranan yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang. Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subyek yang melakukan segala kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan memberikan daya beli kepada masyarakat dan seterusnya menimbulkan permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang memberikan imbalan pendapatan yang layak akan mampu menimbulkan dan menumbuhkan pasar dalam negeri.

Makin banyak jumlah tenaga kerja dapat digunakan secara penuh dan produktif dalam pembangunan, maka makin besarlah pasar dalam negeri akan dapat dikembangkan. Ini berarti makin banyak anggota masyarakat yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pasar dalam negeri yang besar dan kuat tersebut akan memberikan kepada dunia usaha kesempatan untuk hidup dan berkembang.⁸⁴

3. Hubungan Belanja Pemerintah terhadap PDRB

Belanja pemerintah merupakan belanja daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan

⁸⁴ Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta (1992), h.8

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.⁸⁵

Berdasarkan peraturan yang baru Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Dalam instrumen belanja pemerintah terdapat alokasi belanja modal yang disebut sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relative perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.⁸⁶

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 180.

⁸⁶ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional.⁸⁷ Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan (Y).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh tingkat investasi dan belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitrah Afrizal yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan”⁸⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat investasi, dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB dengan nilai thitung 7,021161 > 2,228 ttabel. Dari hasil penelitian belanja pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai thitung 7,317007 > 2,228 ttabel. Dan dari hasil penelitian juga diketahui adanya pengaruh positif antara variabel tenaga kerja terhadap PDRB dengan nilai thitung 3,106299 > 2,228 tabel.

Trias Fajar Novianto melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pendapatan asli daerah, investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan

⁸⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 450.

⁸⁸ Fitrah Afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011*, Penelitian Terdahulu, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

PDRB Provinsi Jawa Tengah.⁸⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB dengan tingkat signifikan 0,016 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, hasil penelitian variabel investasi terhadap pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan tingkat signifikansi 0,322 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, hasil penelitian angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dengan tingkat signifikansi 0,044 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.

Harjanti (2005) dalam penelitiannya mencoba mengestimasi penyerapan tenaga kerja di Kota Salatiga selama periode penelitian (1989-2003). Ternyata bahwa rasio pengeluaran pemerintah per PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan rasio investasi per PDRB dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan. Semakin tinggi rasio investasi per PDRB maka penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat, demikian juga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka penyerapan semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan peningkatan investasi yang menyebabkan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja maka pengangguran akan semakin berkurang.

Novia Hadji Ali, Deasy Engka, Steva Tumangkeng (2009) meneliti tentang pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, Hasil penelitiannya menunjukkan

⁸⁹ Trias Fajar Novianto, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi, dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah*, Penelitian Terdahulu, Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

bahwa secara simultan variabel pengeluaran konsumsi dan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan secara parsial variabel pengeluaran konsumsi tidak berpengaruh signifikan sedangkan investasi berpengaruh secara signifikan. Penelitian ini memiliki nilai R^2 89,42%. Penelitian ini menggunakan metode (*Ordinary Least Square*).

Yuliarmi (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Provinsi Bali. Variabel tergantung yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali (1994-2005), sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah daerah. Analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan metode *OLS*. Hasil penelitiannya adalah variabel bebas yang berupa konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.⁹⁰

H. Kerangka Pemikiran

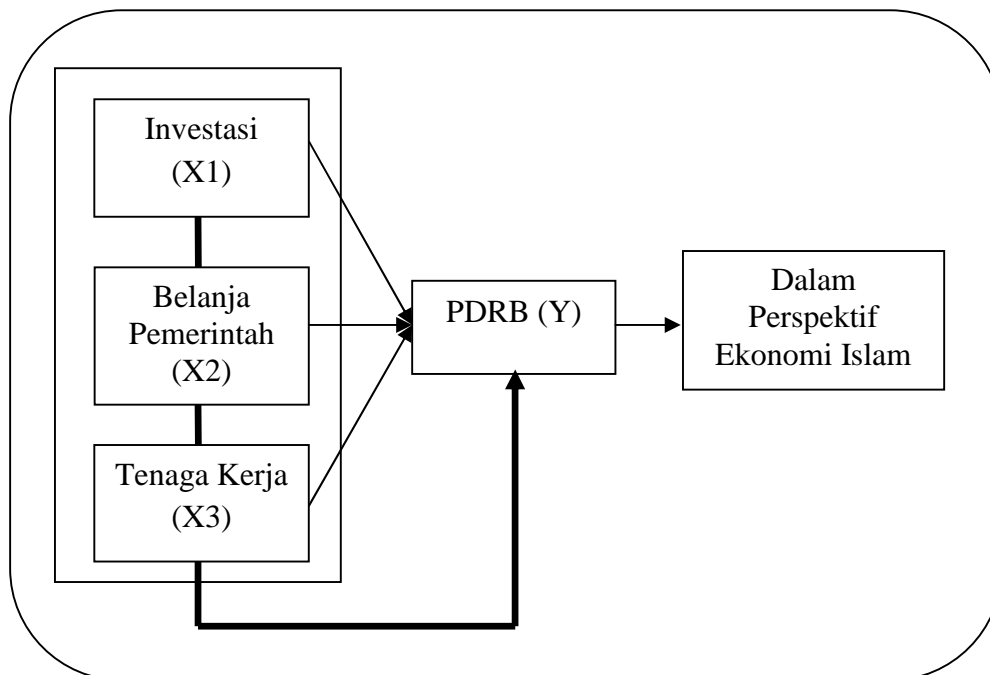
Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam yang tersedia maupun sumber daya manusia. Kondisi ini akan menarik para investor untuk menanam investasi, hal ini tentunya akan membawa manfaat yang positif tidak hanya bagi negara tetapi juga setiap

⁹⁰Yuliarmi, 2008. *Pengaruh Konsumsi rumah tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Bali*. (Skripsi).

daerah yang ada di negara yang bersangkutan. Pemberlakuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan titik tolak pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih mandiri.

Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal itu, Propinsi Lampung menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki Provinsi Lampung dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian, tingkat investasi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah baik dari investasi asing maupun investasi dalam negeri yang akan meningkatkan nilai PDRB serta menambah sumber pendapatan tidak hanya pada daerah tetapi juga masyarakat. Berdasarkan asumsi-asumsi pada pengaruh tingkat investasi dan belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Lampung, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagaimana dalam gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data⁹¹. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris dengan data. Di bawah ini adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap

⁹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung : Alfabeta, 2012), h.96.

pelaksanaan penelitian berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian.

Karena pada penelitian ini menggunakan data sampel maka hipotesis yang digunakan ialah hipotesis statistik, dinamakan hipotesis statistik karena penelitian ini untuk mengetahui keadaan populasi, sumber datanya menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, yang dipelajari ialah data sampel.

1. Pengaruh Investasi terhadap PDRB di Provinsi Lampung

Menurut Deprianto dkk, perkembangan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan perkembangan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan karena penurunan perkembangan investasi mengindikasikan telah terjadinya penurunan penanaman modal atau pembentukan modal.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardiningsih Arifin pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan

Tingkat Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makasar Tahun 2006-2015". Hasil yang diperoleh bahwa secara parsial dan simultan Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H1 : Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Lampung

2. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Lampung

Payaman J. Simanjuntak menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, produktif serta memberikan imbalan dan penghargaan yang layak, mempunyai peranan yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subyek yang melakukan segala kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan memberikan daya beli kepada masyarakat dan seterusnya menimbulkan permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang memberikan imbalan pendapatan yang layak akan mampu menimbulkan dan menumbuhkan pasar dalam negeri.

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Hadji Ali, Deasy Engka, dan Steeva Tumangkeng, menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. jika tenaga kerja bertambah maka pertumbuhan ekonomi meningkat.

H2 : Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Lampung

3. Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Sadono dalam Zahari menjelaskan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Hadji Ali, Deasy Engka, dan Steeva Tumangkeng, menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. jika pengeluaran konsumsi pemerintah bertambah maka pertumbuhan ekonomi meningkat.

H3 : Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Lampung

4. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki Provinsi Lampung dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian, tingkat investasi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah baik dari investasi asing maupun investasi dalam negeri yang akan meningkatkan nilai PDRB serta menambah sumber pendapatan tidak hanya pada daerah tetapi juga masyarakat. Berdasarkan asumsi-asumsi pada pengaruh tingkat investasi dan belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Lampung,

H4 : Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Lampung

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis.¹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Libraray Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik baerupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai tingkat pengangguran.²

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan gambran tentang pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung Tahun 2008-2017 yang menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis serta mengintrpretasikanya. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai

¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,2011), h.97.

² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h.5.

sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³ Dalam kaitan dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku, sebagai teori, dan lain sebagainya.⁴ Dalam hal ini, penulis menggunakan data-data Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website.⁵ Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data resmi yang

³ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), h.47.

⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014,) h.75.

⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h.231.

diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung melalui Laporan Keuangan Tahunan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literature terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.⁶

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁷ Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh laporan keuangan terkait data investasi, baik investasi penanaman modal asing maupun investasi penanaman modal dalam negeri, data tenaga kerja dan data Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung tahun 2008-2017.

2. Sample

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel sepuluh tahun yaitu dari tahun 2008-2017.

⁶ Wiratna, Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), h.157.

⁷ Sugiyono. *Op.Cit.* h.174.

⁸ Wiratna, Sujarweni, *Op.Cit.* h.81.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.⁹ Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Data variabel X1 terkait realisasi investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri) di Provinsi Lampung
- b. Data variabel X2 terkait realisasi belanja pemerintah (Belanja langsung dan tidak langsung) di Provinsi Lampung
- c. Data variabel X3 terkait tenaga kerja di Provinsi Lampung
- d. Data variabel Y terkait produk domestik regional bruto Per kapita di Provinsi Lampung
- e. Seluruh data yang digunakan untuk variabel independen dan dependen dari tahun 2008-2017

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*Variabel Dependen*)

Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.¹⁰ Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu PDRB. PDRB yang akan diteliti adalah mengenai pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB yang diambil dari tahun 2008-2017.

⁹ *Ibid*, h.88.

¹⁰ Sugiyono, *Op.Cit*, h.61.

2. Variabel Bebas (*Variabel Independen*)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain :

a. Investasi

Investasi merupakan pengeluaran atau penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian.

b. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Dan menurut UU No.13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

c. Belanja Pemerintah

Belanja Pemerintah adalah jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan social.

¹¹ *Ibid.* h.62.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum dan konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹²

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel. Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen.¹³ Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Reasearch*, (Yogyakarta:ANDI, 2002), h.42.

¹³ Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta:ANDI, 2011), h.177.

menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaliknya digunakan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang layak dan baik digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kolmogorov-smirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *Kolmogorov-smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dengan pengambilan keputusan :

- a) Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal
- b) Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal¹⁴

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas maka terdapat problem

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Pers, 2015), h.52-56.

multikolinearitas (multiko) pada model regresi tersebut.¹⁵ Deteksi adanya multikolinearitas :

1. Besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Tolerance

Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah :

- a) Mempengaruhi nilai VIF disekitr angka 1
- b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1

2. Besaran Korelasi antara variabel independen

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolineritas adalah keofisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah dibawah 0,05. Jika korelasi kuat maka terjadi problem multikolinearitas.¹⁶

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autikorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika *variance*

¹⁵ *Ibid*, h. 207.

¹⁶ *Ibid*, h. 207.

dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot*.

Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas melalui grafik plot adalah sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Alat Uji Hipotesis

a. Uji T atau Uji Parsial

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengeruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRRB yang merupakan variabel dependennya.

Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut :¹⁷

- a) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- b) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program SPSS pada tabel *coefficients* kolom sig atau *Significance*.

b. Uji F atau Uji Simultan

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 ,) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik.

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai Berikut :

- a) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak
- b) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

¹⁷ Santoso Singgih, *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*, (Jakarta: Gramedia,2004), h.168.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda maka masing-masing independen yaitu Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Pemerintah secara parsial dan secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu profitabilitas yang dinyatakan dengan R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel investasi, tenaga kerja dan belanja pemerintah terhadap PDRB. Sedangkan r^2 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independent terhadap nilai variabel dependen, (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka, dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel terkait. Angka dari R square di dapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model summary kolom R square.

¹⁸ Santoso Singgih, *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*, (Jakarta:Gramedia, 2004), h.167.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. regresi linear berganda untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).¹⁹

Dimana :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Y	= PDRB
a	= Bilangan Konstanta
b ₁ -b ₂	= Koefisien Regresi
X ₁	= Investasi
X ₂	= Tenaga Kerja
X ₃	= Belanja Pemerintah
e	= Standar error

¹⁹ Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), h.241.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lampung adalah sebuah Provinsi Paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, Sebelah Timur Laut Jawa dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan nelayan seperti pasar ikan di Teluk Betung, Tarahan dan Kalinda.⁸⁷

Visi Provinsi Lampung adalah : (Lampung Maju dan Sejahtera 2019). Sedangkan Misi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
- b. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi kehidupan Beragama

⁸⁷ Badan Pusat Statistik, *Publikasi Statistik Lampung*, diakses pada 10 Januari 2019, pukul 07.40 WIB

- c. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
- d. Menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme ASN.⁸⁸

2. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 03/1964 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administrative masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah kekhasan budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu, pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran Penjajahan Belanda.⁸⁹

⁸⁸<http://lampungprov.go.id/page/detail/visi-misi-provinsi-lampung.html>. diakses pada tanggal 30 Januari 2018, Pukul 08.30 WIB

⁸⁹ Badan Pusat Statistik, *Op.Cit.*,

3. Geografi Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dengan Bandar Udara utama adalah “Raden Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 Km dari Ibukota melalui jalan Negara Menuju Kota Bumi dan Lapangan Terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Secara geografi Provinsi Lampung terletak pada kedudukan di antara 105°45’- 103° 48’ BT dan 3°45’ – 6°45’ LS. Daerah ini disebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah Timur dengan Laut Jawa.

Kawasan bagian barat Provinsi Lampung merupakan daerah pegunungan sebagai rangkaian dari Bukit Barisan. Terdapat tiga buah Gunung yang tingginya lebih dari 2.000m diatas permukaan laut, yaitu Gunung Pesagi di Kabupaten Lampung Barat dengan ketinggian 2.239m, Gunung Tanggamus dengan tinggi 2.102m terletak di Kabupaten Tanggamus dan Gunung Tangkit Tebak dengan tinggi 2.115m terletak di Kabupaten Lampung Utara.

Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam lima unit topografi yaitu : daerah topografis berbukit sampai bergunung, daerah topografis berombak sampai bergelombang, daerah dataran alluvial, daerah dataran rawa pasang surut, daerah river basin. Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari bukit barisan yang merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang terdapat di sebelah timurnya.

Hutan-hutan besar di dataran rendah dapat dikatakan sudah habis dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pertanian, untuk para transmigran yang terus-menerus memasuki daerah ini. Kayu-kayu hasil hutan di ekspor ke luar negeri. Dari literatur dan Peta Geologi Lampung dapat diketahui adanya bahan-bahan tambang (endapan mineral) diantaranya :

1. Minyak bumi
2. Uranium
3. Batu Bara Muda (*Brown Coal*)
4. Mineral Besi
5. Emas dan Perak
6. Marmer
7. Sumber Air Panas dan Gas Bumi

Lampung terletak di bawah 83 katulistiwa 5^o lintang selatan beriklim tropis humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya.

4. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung

Masyarakat pesisir lampung kebanyakan nelayan, dan bercocok tanam. Sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun seperti lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan masih banyak lagi. Provinsi Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan

masih banyak lagi. Dan beberapa di daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional.

Selain dari hasil bumi, Provinsi Lampung juga merupakan kota pelabuhan karena Lampung merupakan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke Pulau Sumatera. Dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah banyak industri-industri seperti di daerah Pesisir Panjang, daerah Natar, Tanjung Bintang, Bandar Jaya, dan lain-lain. Dari semua potensi-potensi yang dimiliki tersebut dapat mempengaruhi perekonomian salah satunya adalah dengan cara meningkatkan iklim untuk dilakukannya investasi tidak hanya pada hasil bumi tapi juga dari sektor-sektor industri yang ada.

B. Analisa Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh berdasarkan metode sampel yaitu *Purposive Sampling*. Dari hasil olah data yang dilakukan dapat dijelaskan mengenai variabel- variabel yang terdapat pada model regresi berganda. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh terdiri dari tingkat investasi yaitu jumlah penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri, Tenaga Kerja, Belanja Pemerintah serta Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung.

Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari laporan selama sepuluh tahun (2008-2017) yang ada di Badan Pusat Statistik dan Bank

Indonesia yang dipublikasikan di Internet. Berikut ini adalah pemaparan data yang diperoleh :

a. Produk Domestik Regional Bruto

Adapun data PDRB Provinsi Lampung dengan menggunakan indikator PDRB per kapita adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

PDRB per Kapita Provinsi Lampung Periode 2008-2017

Tahun	PDRB
2008	5.098.640.000
2009	5.748.420.000
2010	6.811.120.000
2011	8.357.190.000
2012	10.078.380.000
2013	11.816.310.000
2014	14.193.420.000
2015	16.630.890.000
2016	18.459.960.000
2017	20.725.000.000

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2008-2017

Berdasarkan keterangan dari tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bagaimana pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terlihat pada tahun 2008 sebesar 5.098.640 menjadi 20.725.000 pada tahun 2017.

b. Investasi

Adapun data mengenai tingkat investasi yang ada di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2008-2017

Tahun	Jumlah Investasi (dalam milyar rupiah)
2008	1,199,640,036,000
2009	1,281,920,086,000
2010	1,990,033,340,000
2011	1,000,700,559,000
2012	7,643,044,588,000
2013	1,365,477,800,000
2014	1,911,000,000,000
2015	5,106,000,000,000
2016	4,322,000,290,000
2017	7,205,000,000,000

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan keterangan dari tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bagaimana pertumbuhan Investasi di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terlihat pada tahun 2008 sebesar 1,199,640,036,000 menjadi 7,205,000,000,000 pada tahun 2017.

c. Tenaga Kerja

Adapun data mengenai tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2008-2017

Tahun	Tenaga Kerja
2008	3.568.770
2009	3.627.155
2010	3.957.697
2011	3.598.090
2012	3.709.599
2013	3.681.084
2014	3.857.936
2015	3.832.108
2016	4.121.668
2017	4.073.034

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan keterangan dari tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bagaimana pertumbuhan jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terlihat pada tahun 2008 berjumlah 3.568.770 menjadi 4.073.034 pada tahun 2017.

d. Belanja Pemerintah

Adapun data mengenai belanja pemerintah yang ada di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran Periode 2008-2017

Tahun	Belanja Pemerintah
2008	751.108.751
2009	865.266.187
2010	1.294.948.833
2011	1.532.401.692
2012	1.711.015.564
2013	1.847.107.847
2014	2.004.899.187
2015	2.566.078.806
2016	4.354.050.898
2017	3.884.534.953

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung
2008-2017

Berdasarkan keterangan dari tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bagaimana pertumbuhan jumlah Belanja Pemerintah di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terlihat pada tahun 2008 sebesar 751.108.751 menjadi 3.884.534.953 pada tahun 2017.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data yang akan diuji sebelumnya harus memenuhi persyaratan normalitas, pengujian yang digunakan adalah uji *One Sample Kolmogorov-smirnov*. Data yang dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* terhadap nilai residual dari persamaan regresi dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Uji Normalitas

Sampel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
120	2,601	0,580	Normal

Sumber : Data diolah 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan model *Kolmogorov Smirnov Z* menunjukkan angka sebesar 2,601 dan nilai signifikansi yang ditunjukkan sebesar 0,580. Untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi . data dari uji normalitas diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,580, nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya bahwa data variabel independen berasal dari data yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Penelitian ini dilakukan terhadap data bahwa data harus terbebas dari gejala multikolinearitas, gejala ini ditunjukkan dengan korelasi antar variabel independen. Pengujian dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) harus berada di angka 10, dan nilai tolerance harus berada diantara 1, hal ini akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Uji Multikolineritas

Vvariabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Investasi	.858	1.165	Tidak terjadi multikolineritas
Tenaga Kerja	.351	2.852	Tidak terjadi multikolineritas
Belanja Pemerintah	.331	3.018	Tidak terjadi multikolineritas

Sumber : Data diolah 2018

Hasil uji multikolineritas ditunjukkan oleh tabel 4.6 dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Penelitian ini menggunakan variable Investasi, Tenaga Kerja, dan Belanja Pemerintah. Nilai VIF dari variabel independen Investasi sebesar 1.165, Tenaga Kerja sebesar 2.852, Belanja Pemerintah sebesar 3.018, nilai tersebut lebih kecil dari 10. Maka dikatakan bahwa tidak terdapat multikolineritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode

sebelumnya ($t-1$). Penelitian ini menggunakan model regresi dengan uji *Durbin Watson*. Hasil perhitungan *Durbin Watson* (d) dibandingkan dengan nilai tabel d pada $\alpha = 0,05$, pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai batas bawah (dU). Jika $d < dL$ dan apabila $d > 4 - dL$ maka terdapat autokorelasi. Jika $dU < d < 4 - dU$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji *Durbin Watson* ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Sampel	Durbin-Watson	Keterangan
120	.207	Tidak terjadi autokorelasi

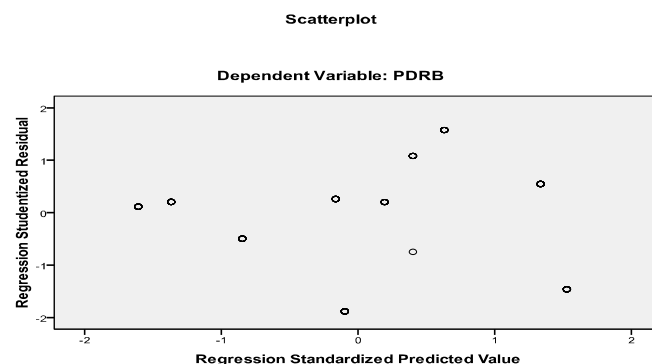
Sumber : data sekunder yang diolah, 2018

Hasil uji autokorelasi dengan model *durbin Watson* menunjukkan angka d sebesar 1,897, sementara jumlah data (n) pada penelitian ini berjumlah 120 maka nilai batas atas (dL) sebesar 1,6513 dan nilai batas bawah (dU) sebesar 1,7536. Berdasarkan ketentuan uji *durbin Watson* bahwa data dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika $dU < d < 4 - dU$, maka hasil ini menunjukkan $1,7536 < 0,207 < 2,3487$ yang artinya dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *Variance* dan *Residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0, titik-titik data yang mengumpul hanya pada diatas atau dibawah saja, penyebaran data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 4.1 sebagai berikut :



Gambar 4.1
Heteroskedastisitas

Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak berpola jadi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model pengujian regresi berganda merupakan model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Adapun hasil yang ditunjukkan dari uji regresi berganda pada variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Ringkasan Uji Regresi Berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien	t _{hitung}	Signifikansi	Kesimpulan
(Constant)		20,074	4.471	.000	
PDRB					
Investasi	Positif	.045	-4.477	.000	Berpengaruh
Tenaga Kerja	Positif	1.568	-4.829	.000	Berpengaruh
Belanja Pemerintah	Positif	.985	32.620	.000	Berpengaruh
F _{hitung} = 791.578					
Signifikansi = .000 ^a					
Adjusted R ² = .952					
R Square = .953					

Sumber : Data diolah 2018

Hasil persamaan regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.8. berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap variabel – variabel penelitian ini maka persamaan regresi yang diperoleh adalah :

$$\text{PDRB} = 20,074 + 0,045 \text{ INV} + 1,568 \text{ TK} + 0,985 \text{ BP}$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 20,074 menyatakan bahwa jika variabel investasi, tenaga kerja dan belanja

pemerintah dianggap konstan, maka rata-rata PDRB adalah sebesar 20,074.

Sementara itu, dari hasil regresi tersebut menunjukkan :

- a. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel investasi, tenaga kerja dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap PDRB dikarenakan nilai signifikansi variabel investasi, tenaga kerja dan belanja pemerintah sebesar 0,000, 0,000, dan 0,000 lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$.
- b. Koefisien regresi Investasi sebesar .045 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% nilai Investasi, maka secara rata-rata, PDRB akan meningkat sebesar .045 dengan syarat variabel lainya konstan.
- c. Koefisien regresi Tenaga Kerja sebesar 1.568 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% nilai Tenaga Kerja, maka secara rata-rata, PDRB akan meningkat sebesar 1.568 dengan syarat variabel lainya konstan.
- d. Koefisien regresi Belanja Pemerintah sebesar .985 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% nilai Belanja Pemerintah, maka secara rata-rata, PDRB akan meningkat sebesar .985 dengan syarat variabel lainya konstan.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel dependen memberikan

hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted R²* untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi atau *Adjusted R²* diperoleh nilai sebesar 0,952 atau 95,20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 95,20% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh variabel Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah. Sedangkan sisanya ($100\% - 95,20\% = 4,80\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Berdasarkan uji ANOVA atau uji F yang dilakukan pada variabel Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap variabel PDRB, didapat nilai F_{hitung} sebesar 791.578 dengan signifikansi 0,000.

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ itu artinya nilai signifikansi uji F jauh lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB.

6. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap variabel PDRB.

Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah jika nilai signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ (5%), maka H_0 dapat ditolak dengan demikian H_a dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen :

a. Investasi

Hasil uji t pada tabel 4.8 diatas untuk variabel Investasi terhadap PDRB, menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar .045. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) dari variabel Investasi yang menyatakan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB diterima.

b. Tenaga Kerja

Hasil uji t pada tabel 4.8 diatas untuk variabel Tenaga Kerja terhadap PDRB, menunjukkan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 1.568. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H2) dari variabel Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB diterima.

c. Belanja Pemerintah

Hasil uji t pada tabel 4.8 diatas untuk variabel Belanja Pemerintah terhadap PDRB, menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar .985. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H3) dari variabel Belanja Pemerintah yang menyatakan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB diterima.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung

a. Pengaruh Investasi (X_1) terhadap PDRB di Provinsi Lampung

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Investasi tercipta dari penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak dengan tujuan memperbesar *output*. Investasi yang lazim disebut dengan penanaman modal berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara bahkan wilayah.

Dari hasil penelitian secara parsial diketahui nilai signifikan untuk variabel X_1 (Investasi) sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga variabel investasi berpengaruh terhadap PDRB. Berdasarkan uji t diperoleh keterangan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya tingkat investasi akan mempengaruhi tinggi rendahnya PDRB. Koefisien regresi Investasi sebesar .045 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% nilai Investasi, maka secara rata-rata, PDRB akan meningkat sebesar .045 dengan syarat variabel lainya konstan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardiningsih Arifin pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di

Kota Makasar Tahun 2006-2015". Yuliarmi (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Provinsi Bali. Hasil penelitiannya adalah variabel bebas yang berupa konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Menurut Todaro, persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk *output* dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam pembentukan modal untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.⁹⁰

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan

⁹⁰ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 92.

pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Berikut ini adalah total jumlah investasi yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 4.9
Jumlah Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Investasi (dalam milyar rupiah)
2013	1,365,477,800,000
2014	1,911,000,000,000
2015	5,106,000,000,000
2016	4,322,000,290,000
2017	7,205,000,000,000

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 4.9 jumlah investasi yang ada di provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan dalam kurun waktu 2014 kegiatan ekonomi terfokus kepada tahun politik sehingga para investor kurang tertarik dengan kegiatan investasi yang ada.

Harorrd dan Dommar memberikan peran kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan yang kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

Berdasarkan analisis diatas terdapat kesesuaian teori yang ada yaitu investasi mempunyai peranan kunci dalam proses pembangunan, karena syarat umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama akumulasi modal.⁹¹ Pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi karena investasi dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan suatu daerah dan perekonomian daerah tersebut, apabila semakin tinggi tingkat investasi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Misalnya investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Tetapi penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi investasi terhadap PDRB menunjukan semakin tinggi atau rendahnya tingkat investasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga disebabkan oleh kebijakan daerah yang belum memberikan iklim usaha yang kondusif bagi investor baik asing maupun dalam negeri untuk

⁹¹ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 92.

melakukan penanaman modalnya. Kurangnya dukungan pemerintah dalam mengelola potensi yang ada dan sumber daya yang tersedia, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk kegiatan yang produktif dengan memperluas kegiatan investasi.

Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah *output* dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

Berikut ini adalah kontribusi investasi PMA maupun PMDN yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 4.10
Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung

Tahun	PMA	PMDN
2013	1.063.000.000	302.477,80
2014	469.000.000	1.442.000.000
2015	1.643.000.000	3.463.000.000
2016	3.222.000.000	1.102.000,29
2017	1.173.000.000	6.032.000.000

Sumber : BPS Lampung

Berdasarkan tabel 4.10 investasi yang ada di Provinsi Lampung baik PMA maupun PMDN dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu tujuan dari para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Lampung.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan perkembangan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan karena penurunan perkembangan investasi mengindikasikan telah terjadinya penurunan penanaman modal atau pembentukan modal.

b. Pengaruh Tenaga Kerja (X_2) terhadap PDRB di Provinsi Lampung

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga kerja adalah setiap orang yang termasuk angkatan kerja dan sudah bekerja guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dari hasil penelitian secara parsial diketahui nilai signifikan untuk variabel X_2 (Tenaga Kerja) sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Berdasarkan uji t diperoleh keterangan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB, hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya tingkat tenaga kerja akan mempengaruhi tinggi rendahnya PDRB. Koefisien regresi Tenaga Kerja sebesar 1.568 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% nilai Tenaga Kerja, maka secara rata-rata, PDRB akan meningkat sebesar 1.568 dengan syarat variabel lainya konstan.

Hasil ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Trias Fajar Novianto melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pendapatan asli daerah, investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dalam penelitian Harjanti (2005) dalam penelitiannya mencoba mengestimasi penyerapan tenaga kerja di Kota Salatiga selama periode penelitian (1989-2003).

Ternyata bahwa rasio pengeluaran pemerintah per PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan rasio investasi per PDRB dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan. Semakin tinggi rasio investasi per PDRB maka penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat, demikian juga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka penyerapan semakin meningkat.

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbanyak jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara untuk menambah produksi.

Berikut ini adalah penyerapan tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 4.11
Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2013-2017

Tahun	Tenaga Kerja
2013	3.681.084
2014	3.857.936
2015	3.832.108
2016	4.121.668
2017	4.073.034

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 4.11 di atas jumlah tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu

mengalami peningkatan yang signifikan. Yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terserap akan semakin meningkatkan jumlah hasil dari produk atau jasa yang dihasilkan di suatu daerah yang ada sehingga kegiatan ekonomi yang ada akan meningkat.

Payaman J. Simanjuntak menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, produktif serta memberikan imbalan dan penghargaan yang layak, mempunyai peranan yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang. Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subyek yang melakukan segala kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan memberikan daya beli kepada masyarakat dan seterusnya menimbulkan permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang memberikan imbalan pendapatan yang layak akan mampu menimbulkan dan menumbuhkan pasar dalam negeri.

Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa Makin banyak jumlah tenaga kerja dapat digunakan secara penuh dan produktif dalam pembangunan, maka makin besarlah pasar dalam negeri akan dapat dikembangkan. Ini berarti makin banyak anggota masyarakat yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pasar dalam negeri yang besar

dan kuat tersebut akan memberikan kepada dunia usaha kesempatan untuk hidup dan berkembang.

c. Pengaruh Belanja Pemerintah (X_3) Terhadap PDRB di Provinsi Lampung

Belanja pemerintah merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah dari penggunaan ekonomi secara langsung yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Belanja pemerintah daerah tercermin dari belanja daerah yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dari hasil penelitian secara parsial diketahui nilai signifikan untuk variabel X_3 (Belanja Pemerintah) sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga variabel belanja pemerintah berpengaruh terhadap PDRB. Berdasarkan uji t diperoleh keterangan bahwa variabel belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya tingkat tenaga kerja akan mempengaruhi tinggi rendahnya PDRB. Koefisien regresi Belanja Pemerintah sebesar .985 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% nilai Belanja Pemerintah, maka secara rata-rata, PDRB akan meningkat sebesar .985 dengan syarat variabel lainya konstan.

Ternyata penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fitrah Afrizal 2013, bahwa belanja

pemerintah menjadi bagian penting dari perekonomian makro suatu Negara, karena akan menentukan kemana kondisi ekonomi suatu Negara akan dibawa, dalam jangka panjang ada hubungan positif belanja pemerintah dengan nilai PDRB dimana setiap kenaikan satu satuan dari belanja pemerintah akan menyebabkan peningkatan nilai PDRB.

Komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan dipeson oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolut PDRB.

Berikut ini adalah realisasi belanja pemerintahan yang ada di provinsi lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 4.12
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung
Periode 2013-2017

Tahun	Total Belanja
2013	1.847.107.847
2014	2.004.899.187
2015	2.566.078.806
2016	4.354.050.898
2017	3.884.534.953

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung 2008-2017

Belanja pemerintah di Provinsi Lampung secara keseluruhan di dapat dari belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya terlihat dalam lima tahun terakhir belanja pemerintah selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sampai 2017 yaitu sebesar Rp. 1.847.107/847 meningkat sebanyak Rp. 3.884.534.953 pada tahun 2017 peningkatan ini terjadi secara berfluktuatif setiap tahunnya.

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Sadono dalam Zahari menjelaskan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus lebih baik lagi dalam mengalokasikan anggaran daerah pada APBD ke belanja yang lebih untuk meningkatkan perekonomian seperti pengelolaan aset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan atau lebih luas sumber pendanaan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja pemerintah merupakan prasyarat utama

dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Belanja pemerintah pada alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik seperti pembangunan, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Semakin besar belanja pemerintah terhadap pengeluaran yang dapat menggerakkan perekonomian, maka semakin besar pula peran pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan, begitu juga sebaliknya. Dengan anggapan bahwa besarnya peranan tersebut mencerminkan pemerintah ikut berperan aktif di dalam menyediakan fasilitas pendukung, maka akan berpengaruh secara positif terhadap besar kecilnya nilai dari PDRB di Provinsi Lampung.

d. Pengaruh Investasi (X1), Tenaga Kerja (X2) dan Belanja Pemerintah (X4) Terhadap PDRB di Provinsi Lampung

Berdasarkan uji ANOVA atau uji F yang dilakukan pada variabel Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap variabel PDRB, didapat nilai F_{hitung} sebesar 791.578 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ itu artinya nilai signifikansi uji F jauh lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi atau $Adjusted R^2$ diperoleh nilai sebesar 0,952 atau 95,20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 95,20% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh variabel

Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah. Sedangkan sisanya ($100\% - 95,20\% = 4,80\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Hal ini berarti menjadi perhatian bagi pemerintah untuk terus meningkatkan investasi yang ada serta menggunakan kegiatan belanja pemerintah yang berorientasi pada kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga PDRB dapat meningkat dengan signifikan setiap tahunnya.

2. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

a. Pengaruh Investasi Terhadap PDRB di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi islam

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar* yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti.

Dari paparan diatas bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja, hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

Dalam Ekonomi Islam Menganjurkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*). Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi.

Dalam Ekonomi Islam investasi merupakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada persoalan duniawi semata, dalam hal ini Ekonomi Islam memadukan antara dimensi dunia dan akhirat. Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang muslim yang menginvestasikan dana atau tabunganya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah di investasikanya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya.⁹²

⁹²Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2014), h.297.

Ibnu Khaldun menjelaskan dalam mendorong perekonomian investasi dalam Islam lebih ditujukan pada sektor riil, yaitu investasi yang benar-benar ditanamkan secara langsung pada sektor usaha sehingga investasi pada sektor riil merupakan aktifitas yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan pembangunan ekonomi secara langsung sebab, berpeluang menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan roda perekonomian dan berpengaruh dalam perkembangan usaha yang berkaitan dari hulu ke hilir.

Dalam prakteknya realisasi investasi di Provinsi Lampung menurut lapangan usaha beserta dengan jumlah proyeknya disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.13
Realisasi Investasi di Provinsi Lampung
Tahun 2008-2017

Tahun	Investasi			
	PMA (Milyar Rupiah)	Jumlah Proyek	PMDN (Milyar Rupiah)	Jumlah Proyek
2008	248.283.636	14	951.356,40	7
2009	1.273.120.356	66	8.799.730	140
2010	41.677.140	12	1.948.356,20	8
2011	143.146.659	10	857.553,90	3
2012	731.801.928	49	6.911.242,66	71
2013	1.063.000.000	38	302.477,80	12
2014	469.000.000	123	1.442.000.000	97
2015	1.643.000.000	-	3.463.000.000	-
2016	3.222.000.000	61	1.102.000,29	31
2017	1.173.000.000	47	6.032.000.000	26

Sumber : BPS Lampung

Realisasi investasi proyek di Provinsi Lampung direalisasikan pada lapangan usaha sektor riil terlihat pada tahun pengamatan 2008 jumlah proyek yang terealisasi sebanyak 206 proyek sebagai berikut : 85 ke industri pengolahan, 31 proyek ke perkebunan, 13 perikanan, 11 peternakan, 9 tanaman pangan, 9 pengangkutan dan telekomunikasi, 8 pertambangan, 5 perdagangan, hotel dan restoran, 4 konstruksi dan bangunan, sisanya 28 proyek terealisasi pada sektor jasa-jasa lainnya. Pada tahun 2013 adalah jumlah realisasi proyek paling banyak terealisasi yaitu sebanyak 220 proyek sebagai berikut : 73 terealisasi pada industri makanan, 52 pada industri pengolahan, 25 pada perkebunan, 19 pada perdagangan, hotel dan restoran, 14 pada listrik, gas dan air bersih, 4 pada tanaman pangan, 4 pertambangan dan penggalian, dan terakhir pada konstruksi dan bangunan sebanyak 2 proyek.

Sebagaimana penjelasan di atas kegiatan investasi yang dilakukan oleh Provinsi Lampung lebih banyak dalam sektor riil, yaitu investasi yang benar-benar ditanamkan secara langsung pada sektor usaha sehingga investasi pada sektor riil merupakan aktifitas yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan pembangunan ekonomi secara langsung sebab, berpeluang menciptakan lapangan kerja baru. Berdasarkan investasi yang terealisasi pada berbagai macam lapangan usaha yang ada di Provinsi Lampung dengan tujuan untuk pengembangan berproduksi dan menambah pendapatan Negara menjadikan masyarakat

lebih produktif, maka Islam menganjurkan kegiatan investasi tetapi haruslah tetap sesuai dan sejalan dengan syariat.

b. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Lampung dalam Perspektik Ekonomi islam

Buruh atau tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan perburuhan seperti halnya kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari buruh itu sendiri, ketidakpekaan jangka pendek terhadap permintaannya, dan yang mempunyai sikap dalam penentuan upah, merupakan hal yang sama pada semua sistem.

Walaupun demikian, menurut M. Abdul Mannan sifat faktor produksi dalam Islam yang berbeda ini timbul karena kenyataan bahwa perburuhan, dan karena soal itu, semua faktor produksi tidak hanya tergantung kepada proses perubahan sejarah, seperti yang didapati dalam hal ilmu ekonomi sekular modern, melainkan juga pada kerangka moral dan etika tanpa batas waktu di mana faktor produksi perlu bekerja. Karena banyak atribut hubungan pemilik modal buruh, kode tingkah laku pekerja majikan dan sebagainya, berakar pada Syariat. Akibatnya, buruh sebagai faktor produksi dalam Islam tidak pernah terpisahkan dari kehidupan moral dan sosial.

Dalam Ekonomi Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung

jawab moral dan sosial. Memang benar bahwa seorang pekerja modern memiliki tenaga kerja yang berhak dijualnya dengan harga setinggi mungkin. Tetapi dalam Islam ia tidak mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Ia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan pekerjaan yang tidak diizinkan oleh Syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Semua tanggung jawab buruh tidak berakhir pada waktu seorang pekerja meninggalkan pabrik majikannya, ia mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung.

Demikianlah terlihat, bahwa dalam Ekonomi Islam buruh digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Lebih luas, karena hanya memandang pada penggunaan jasa buruh di luar batas-batas pertimbangan keuangan. Terbatas dalam arti bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu.

Pemanfaatan tenaga kerja manusia dalam rangka mengejawantahkan dan mengaktualisasikan fungsi kekhalifan dan sekaligus fungsinya sebagai pembangun, sangat dihargai oleh ajaran (syari'at Islam). Sehubungan dengan hal tersebut, manusia sebagai pekerja, mutlak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan melaksanakan aktivitasnya.

Menurut M.Abdul Mannan, seorang tenaga kerja atau SDM harus memiliki kecakapan dalam bekerja. Pekerja harus memiliki keahlian dan ketampilan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Islam sangat menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap, dan diperintahkan kepada semua umat muslim untuk mengerjakan semua jenis pekerjaan dengan tekun dan sempurna. Pada umumnya keahlian seseorang akan sangat bergantung pada kemampuan yang dimiliki.

Namun dalam praktiknya tenaga kerja yang ada di Provinsi Lampung dalam hal kecakapan dalam bekerja belum ditunjang dengan mengikuti lembaga pelatihan dan pengembangan kemampuan melalui balai latihan karya yang ada. Berikut ini adalah data dari angkatan kerja yang berasal dari balai latihan kerja ataupun lembaga pelathan lainnya :

Tabel 4.14
Angkatan Kerja Berdasarkan Lulusan Lembaga Pelatihan yang Bekerja
di Provinsi Lampung Tahun 2011-2017

Tahun	Lulusan Lembaga Pelatihan	Jumlah Angkatan Kerja
2011	239.038	3.737.078
2012	239.292	3.368.486
2013	280.838	3.516.856
2014	300.188	3.471.602
2015	305.244	3.673.158
2016	252.149	3.635.258
2017	342400	3.896.230

Sumber : BPS Lampung

Berdasarkan tabel 4.14 Kondisi tenaga kerja di Provinsi Lampung yang berasal dari lulusan lembaga pelatihan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang ada, sehingga jumlah angkatan kerja yang ada sangat jarang yang memiliki bekal dengan kemampuan yang berasal dari lembaga pelatihan. Karena tenaga kerja baru harus memiliki ketrampilan dasar yang dibutuhkan. Mereka adalah produk dari suatu sistem pendidikan dan mempunyai pengalaman yang diperoleh dari organisasi lain. Tidak jarang pula tenaga baru yang diterima tidak mempunyai kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugas – tugas mereka. Bahkan tenaga kerja yang baru juga perlu menyesuaikan dengan organisasi dan orang – orangnya.

Tenaga kerja yang ada sangat membutuhkan adanya program latihan dan pengembangan tenaga kerja. Secara umum ada dua tujuan utama program latihan dan pengembangan tenaga kerja, yaitu: pertama latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup gap antara kecakapan dan kemampuan tenaga kerja dengan permintaan jabatan dan kedua diharapkan program tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari seorang tenaga kerja dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan.

c. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap PDRB di Provinsi Lampung dalam Perspektik Ekonomi Islam

Belanja pemerintah dalam Ekonomi Islam baik Negara atau pemerintah sesungguhnya sangat berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Apabila ada rakyat yang menganggur atau miskin bahkan terlunta-lunta tanpa keluarga dan sanak famili, maka Negara wajib membantu dan menyelamatkan mereka dengan pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk pemberdayaan maupun dalam bentuk santunan. Demikian juga apabila rakyatnya memerlukan fasilitas sarana dan prasarana maka negarapun wajib untuk mengadakannya. Karena itulah Negara membutuhkan dana atau pembiayaan yang cukup untuk tujuan kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan rakyat pada umumnya. Dana tersebut adalah bersumber dari penghasilan Negara atau kepemilikan Negara yang ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Menurut Ibnu Khaldun, keberhasilan negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran sesuai dengan tujuan yang disyaratkan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena kebijakan pengeluaran tersebut adalah suatu proses distribusi pendapatan kepada masyarakat. Terdapat beberapa kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam diantaranya yaitu: Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin, Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia (mencakup infrastruktur, kesehatan,

pendidikan dan sejenisnya), Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut pendanaannya (bentuk pembelanjaan seperti ini biasanya melalui mekanisme subsidi, baik subsidi langsung atau subsidi tidak langsung melalui mekanisme produksi barang-barang yang disubsidi).

Namun dalam praktiknya, alokasi belanja pemerintah Provinsi Lampung yang ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang seperti belanja dalam bidang sosial, belanja barang dan jasa dan barang modal. Adapun alokasi belanja modal, barang dan jasa serta belanja bantuan sosial disajikan dalam persentase sebagai berikut :

Tabel 4.15
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung
Periode 2007-2016

Tahun	Total Belanja	Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial
2008	751.108.751	557.869.150
2009	865.266.187	657.863.214
2010	1.294.948.833	987.654.707
2011	1.532.401.692	1.284.287.904
2012	1.711.015.564	1.477.627.486
2013	1.847.107.847	1.567.980.000
2014	2.004.899.187	1.789.987.000
2015	2.566.078.806	1.567.890.678
2016	4.354.050.898	2.897.789.567
2017	3.884.534.953	2.569.457.890

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung
2008-2017

Dari tabel 4.15 di atas dapat dijelaskan bahwa alokasi sektor belanja ini dianggap sebagai belanja yang memiliki orientasi lebih terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan pula bahwa kebijakan pemerintah dalam alokasi belanja yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lebih diorientasikan ini dapat dilihat dari peningkatan belanja modal, barang dan jasa dan belanja bantuan sosial yang secara persentase menunjukan trend yang positif, yang ini secara tidak langsung juga sejalan dengan tujuan pembangunan dalam ekonomi Islam itu sendiri.

Selain itu dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan dengan pengaturan antara pendapatan dan pengeluarannya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Lampung harus dapat lebih mengelola sumber daya yang ada dan sumber pembiayaannya melalui anggaran APBD ke pengeluaran dan bantuan sosial yang lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi menjadi lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2017” maka kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Investasi terhadap PDRB, menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar .045. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) dari variabel Investasi yang menyatakan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB diterima.

Variabel Tenaga Kerja terhadap PDRB, menunjukkan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar 1.568. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) dari variabel Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB diterima.

Variabel Belanja Pemerintah terhadap PDRB, menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien regresi bernilai positif yakni sebesar .985. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_3) dari variabel Belanja Pemerintah yang menyatakan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB diterima.

2. Dalam Islam Investasi diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk menghindari aset-aset yang tidak termanfaatkan secara produktif. Jika tujuan utamanya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat maka, Islam tidak melarang segala bentuk investasi, tetapi haruslah sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Untuk mendorong perekonomian Investasi dalam Islam lebih di tujukan pada sektor riil dimana investasi ini secara langsung akan berdampak pada perkembangan pembangunan ekonomi sebab, berpeluang menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan roda perekonomian dan berpengaruh dalam perkembangan usaha yang berkaitan dari hulu ke hilir.

Dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan dalam pengaturan antara pendapatan dan pengeluarannya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila ada rakyat yang menganggur atau miskin bahkan terlunta-lunta tanpa keluarga dan sanak famili, maka Negara wajib membantu dan menyelamatkan mereka dengan pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk pemberdayaan maupun dalam bentuk

santunan. Secara struktural belanja pemerintah dalam APBD yang sesuai dengan ekonomi Islam belum mencerminkan sebagaimana belanja pemerintah dalam ekonomi Islam, namun secara alokasi anggaran dalam ekonomi Islam mensyaratkan adanya pembangunan ekonomi dalam berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah di dapat penulis. Maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu:

1. Kegiatan investasi baik PMA maupun PMDN Pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas dari pelayanan terhadap Investasi yang ada di Provinsi Lampung yang pada akhirnya akan lebih menambah jumlah investor yang menanamkan modalnya di Provinsi Lampung.
2. Tenaga Kerja yang ada di Provinsi Lampung harus memiliki kualitas yang unggul, sehingga dapat meningkatkan PDRB yang ada, karena dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas akan dapat meningkatkan produktivitas di Provinsi Lampung, baik barang dan jasa.
3. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung harus dapat dialokasikan ke dalam kegiatan yang tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi lebih kegiatan pembangunan ekonomi dengan berbasis pengembangan UMKM yang ada sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Peneliti selanjutnya disarankan menyertakan variabel lain seperti variabel dari sisi pendapatan, ekspor impor dan pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arti Kata Faktor, diakses dari www.m.artikata.com, pada tanggal 14 April 2017, pukul 14.30 Wib
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia, 2011.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Katalog BPS. *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera 2012-2016*. Lampung : Statistik Provinsi Lampung, BPS, 2016.
- Katalog BPS. *Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung*. Lampung : BPS, 2014.
- Kuncoro, Mudrajat. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 1997.
- Lukas Setia Atmaja. *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI, 2011.
- Moh. Prabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Nugroho SBM. *Evaluasi terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya*, jurnal Riptek, Vol.2, No.1, Tahun 2008.
- Ratmini dan Septi Antik Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2000.
- Santoso Singgih. *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Sukirno Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sukirno Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Surya. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: ANDI, 2002.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004. *Tentang Peraturan Pemerintah Daerah*. pasal 2 ayat 2.

Usman, Husnaini dan Setiadi. *Pengantar Statistika*. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003.

V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

V. Wiratna Sujarweni. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Baru Pers, 2015.

Wiratna, Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015.

Tahun	Investasi	Ln	Tenaga Kerja	Ln	Belanja Pemerintah	Ln	PDRB	Ln
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2008	99970003000	25,32813601	3.568.770	15,08773156	62592396	17,95215436	424887	12,95957853
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2009	1,06827E+11	25,39447349	3.627.155	15,10395915	72105516	18,0936411	479035	13,07952894
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697	15,19117285	107912403	18,49683037	567593	13,24915989
2010	1,65836E+11	25,83426586	3.957.697					

[illegible]

[illegible]

PDRB per Kapita Provinsi Lampung Periode 2008-2017

Tahun	PDRB
2008	5.098.640.000
2009	5.748.420.000
2010	6.811.120.000
2011	8.357.190.000
2012	10.078.380.000
2013	11.816.310.000
2014	14.193.420.000
2015	16.630.890.000
2016	18.459.960.000
2017	20.725.000.000

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2008-2017



Jumlah Investasi di Provinsi Lampung Tahun 2008-2017

Tahun	Jumlah Investasi (dalam milyar rupiah)
2008	1,199,640,036,000
2009	1,281,920,086,000
2010	1,990,033,340,000
2011	1,000,700,559,000
2012	7,643,044,588,000
2013	1,365,477,800,000
2014	1,911,000,000,000
2015	5,106,000,000,000
2016	4,322,000,290,000
2017	7,205,000,000,000

Sumber : BPS Provinsi Lampung



Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2008-2017

Tahun	Tenaga Kerja
2008	3.568.770
2009	3.627.155
2010	3.957.697
2011	3.598.090
2012	3.709.599
2013	3.681.084
2014	3.857.936
2015	3.832.108
2016	4.121.668
2017	4.073.034

Sumber : BPS Provinsi Lampung



**Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut
Pengeluaran Periode 2008-2017**

Tahun	Belanja Pemerintah
2008	751.108.751
2009	865.266.187
2010	1.294.948.833
2011	1.532.401.692
2012	1.711.015.564
2013	1.847.107.847
2014	2.004.899.187
2015	2.566.078.806
2016	4.354.050.898
2017	3.884.534.953

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung
2008-2017

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10201220
Most Extreme Differences	Absolute	.237
	Positive	.127
	Negative	-.237
Kolmogorov-Smirnov Z		2.601
Asymp. Sig. (2-tailed)		.580

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.976 ^a	.953	.952	.103	.207

a. Predictors: (Constant), Belanja Pemerintah, Investasi, Tenaga Kerja

b. Dependent Variable: PDRB

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

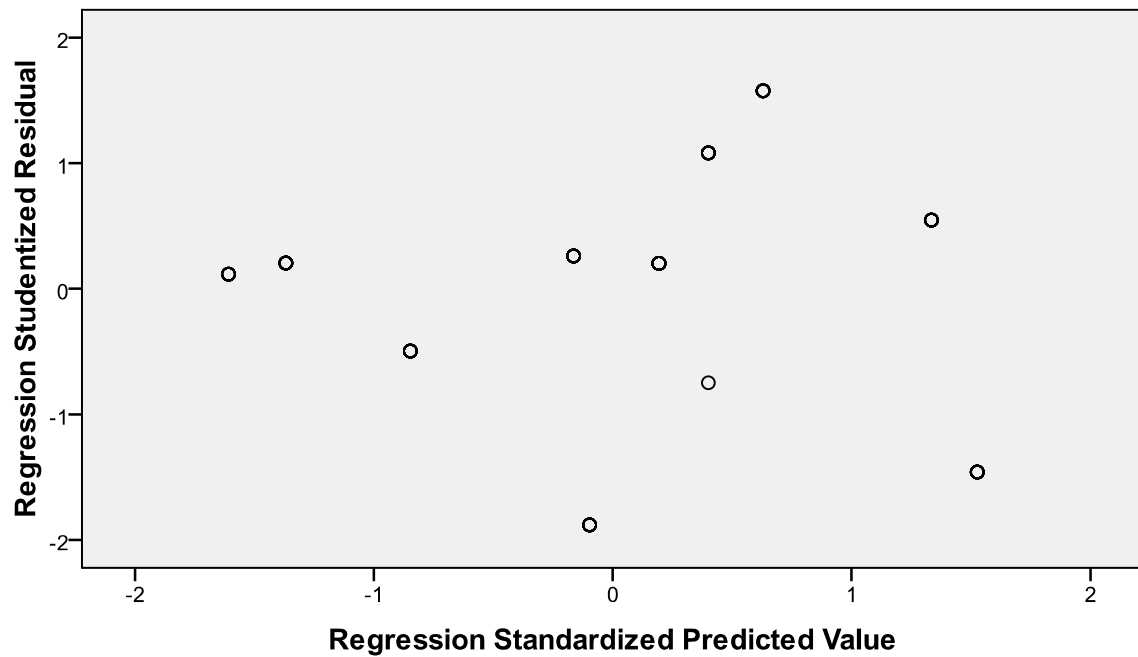
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	20.074	4.490		4.471	.000		
Investasi	.045	.010	-.097	-4.477	.000	.858	1.165
Tenaga Kerja	1.568	.325	-.163	-4.829	.000	.351	2.852
Belanja Pemerintah	.985	.030	1.136	32.620	.000	.331	3.018

a. Dependent Variable: PDRB

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: PDRB



Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	20.074	4.490		4.471	.000		
Investasi	.045	.010	-.097	-4.477	.000	.858	1.165
Tenaga Kerja	1.568	.325	-.163	-4.829	.000	.351	2.852
Belanja Pemerintah	.985	.030	1.136	32.620	.000	.331	3.018

a. Dependent Variable: PDRB

Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25.352	3	8.451	791.578	.000 ^a
Residual	1.238	116	.011		
Total	26.590	119			

a. Predictors: (Constant), Belanja Pemerintah, Investasi, Tenaga Kerja

b. Dependent Variable: PDRB

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.976 ^a	.953	.952	.103	.207

a. Predictors: (Constant), Belanja Pemerintah, Investasi, Tenaga Kerja

b. Dependent Variable: PDRB

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	20.074	4.490		4.471	.000		
Investasi	.045	.010	-.097	-4.477	.000	.858	1.165
Tenaga Kerja	1.568	.325	-.163	-4.829	.000	.351	2.852
Belanja Pemerintah	.985	.030	1.136	32.620	.000	.331	3.018

a. Dependent Variable: PDRB

